

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



KOMPILASI KLIPING MEDIA CETAK KEMENTERIAN PERTANIAN RI

03 JUNI 2024

-Biro Humas dan Informasi Publik-

Title	Lonjakan Harga	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Antara/Muhammad Bagus Khoirunas	

» Lonjakan Harga



ANTARA/MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNAS

» Pedagang melayani warga yang membeli bahan kebutuhan pokok di Pasar Rangkasbitung, Lebak, Banten, Sabtu (1/6). Menurut pedagang, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan seperti bawang merah dari sebelumnya 30 ribu rupiah per kilogram kini menjadi 45 ribu rupiah per kilogram, cabai merah 30 ribu rupiah per kilogram menjadi 50 ribu rupiah per kilogram.

Title	Implementasi B40 untuk Alsintan Dipacu	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Ers/E-10	

Implementasi B40 untuk Alsintan Dipacu

JAKARTA - Pemerintah mendorong penerapan penggunaan B40 (Biodiesel 40 persen) di sektor alat mesin pertanian (Alsintan). Hal itu dipaparkan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Titik Kritis Penanganan dan Penyimpanan Bahan Bakar B40 di Sektor Alsintan” yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, pekan lalu.

Kepala Lemigas, Mustafid Gunawan menjelaskan pemerintah melalui Lemigas terus mendorong peningkatan penggunaan biodiesel. Untuk itu kegiatan diskusi ini diharapkan jadi jembatan untuk lebih memperkuat fondasi kebijakan penggunaan biodiesel bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Lemigas sebagai unit teknis pengujian di bawah Direktorat Jenderal Migas akan terus memberikan dukungan kepada program pemerintah untuk menggalakan penggunaan bahan bakar biodiesel. Dalam hal ini, Lemigas mendukung dengan melakukan uji penggunaan bahan bakar B40 pada sektor non otomotif yang didukung dengan para tenaga ahli yang berkompeten dan laboratorium Lemigas berteknologi tinggi,” jelas Mustafid.

B40 adalah biodiesel yang mengandung fatty acid methyl ester atau FAME minyak kelapa sawit sebesar 40 persen dalam komposisi BBM solar.

Dalam FGD tersebut dipaparkan hasil pengamatan dari PT Kubota Indonesia dan PT Yanmar Diesel Indonesia yang menggunakan alsintan berbahan bakar B40.

FGD menyepakati rencana tindak lanjut untuk penyusunan instruksi kerja teknis. “BBPMGB Lemigas akan terus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program B40 di sektor alsintan,” kata Mustafid. ■ **ers/E-10**

Tittle	MANFAATKAN AIR IRIGASI DARI SUMUR TADAH HUJAN	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	1	
Author	Antara/Ryan Sumanjaya	



ANTARA / RYAN SUMANJAYA

MANFAATKAN AIR IRIGASI DARI SUMUR TADAH HUJAN |
Petani menghidupkan pompa air untuk mengairi lahan pertanian jagung di Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (2/6). Sejumlah petani di daerah tersebut saat ini bertani dengan memanfaatkan air irigasi dari sumur tadah hujan yang dibuat di lahan pertanian mereka untuk mengantisipasi kekeringan saat musim tanam.

Title	Penguatan CBP dari Produksi Dalam Negeri Perkuat Ketahanan Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	1	
Author	YK/ers/E-9	

Stok Pangan | Bulog Kalah Bersaing dengan Swasta Menyerap Produksi Petani

Penguatan CBP dari Produksi Dalam Negeri Perkuat Ketahanan Pangan

» Kerawanan pangan akut tinggi sudah meluas ke 18 negara dengan lebih dari 72 juta penduduknya.

JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menekankan bahwa penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari produksi dalam negeri sebagai atensi utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Kami pahami program Banpang (bantuan pangan) beras ini terus kita jalankan dan bersumber dari stok CBP. Untuk itu, penguatan stok CBP di saat produksi dalam negeri menjadi atensi utama kami,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Arief menyebutkan bahwa saat ini tercatat cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog sampai 28 Mei tembus hingga 1,8 juta ton. Kepala Bapanas meyakini total stok tersebut akan terus bertambah, karena Bulog secara konsisten menyerap hasil panen beras dalam negeri.

“Ini karena kita ingin di masa depan saat musim kering melanda atau terjadi suatu kondisi pangan global, kita mampu mengatasinya dengan penyaluran CBP untuk membantu masyarakat melalui berbagai program,” jelas Arief.

Dia menjelaskan berdasarkan “Global Report On Food Crises 2024” yang disusun Food Security Information Network

(FSIN) dan Global Network Against Food Crises, cuaca ekstrem menjadi salah satu penyebab utama kerawanan pangan akut tingkat tinggi sedikitnya bagi 18 negara dengan lebih dari 72 juta penduduknya.

Jumlah itu, lanjut Arief, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang kala itu terdiri dari 12 negara dengan 56,8 juta penduduk yang terdampak rawan pangan akut. Namun, Arief tidak merinci negara-negara yang disebutkan itu.

Selain itu, El Nino dan fenomena cuaca perubahan iklim telah menjadikan tahun 2023 sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat. Dalam proyeksi 2024 itu pula, tambah Arief, banjir dan cuaca ekstrem akibat angin muson dan angin topan masih menjadi kekhawatiran, terutama di kawasan Asia. “Karena itu kita pastikan untuk terus memantau dan memastikan stok CBP dalam kondisi yang baik. Per hari ini 1,8 juta ton dan ini akan terus bertambah,” ungkap Arief.

Lebih lanjut, Arief mengatakan estimasi panen beras menurut Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS) sampai Mei, masih ada surplus terhadap konsumsi bulanan beras. “Jadi, ini memang waktunya CBP terus ditambah, sehingga nanti saat musim kemarau, pemerintah leluasa menyalurkan dalam membantu masyarakat,” jelas Arief.

Arief mengatakan pula menilik data KSA BPS hasil pengamatan April 2024, produksi beras Januari sampai Juli diproyeksikan dapat mencapai 18,74 juta ton. Dari total itu diestimasi dapat ter-

jadi surplus produksi terhadap konsumsi di angka sekitar 650 ribu ton.

Pada April 2024, estimasi produksi beras di angka 5,31 juta ton. Lalu Mei 2024, produksi diperkirakan dapat berada sampai 3,58 juta ton, dan pada Juni 2024 di 2,01 juta ton serta Juli 2024 di 2,15 juta ton.

Sementara realisasi penyerapan beras produksi dalam negeri oleh Perum Bulog sampai 26 Mei total telah menyentuh 601 ribu ton. Ini terdiri dari pengadaan untuk CBP 517 ribu ton dan beras komersial 83 ribu ton. “Sebagai komparasi, realisasi pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog pada tahun 2023 total keseluruhan selama setahun berada di angka 1,066 juta ton,” kata Arief.

Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM, Dwijono Hadi Darwanto, mengatakan sudah menjadi cita-cita bersama Bapanas dibentuk sebagai lembaga yang bermanfaat bagi petani dan masyarakat banyak.

Dwijono mengingatkan di beberapa daerah masih ada panen padi sehingga jika ada stok beras impor dilepas ke pasar maka akan menekan harga gabah di petani. “Serap sebanyak-banyaknya beras petani dalam harga baik sehingga petani semangat menanam,” kata Dwijono.

Kalah Bersaing

Pada kesempatan lain, peneliti ekonomi Celios, Nailul Huda, sepakat dengan pernyataan Bapanas terkait sumber cadangan beras pemerintah yang utama dari petani lokal. Tetapi pada kenyataannya, sering kali Bulog sebagai perwakilan

negara dalam penyerapan beras, kalah saing dengan perusahaan swasta.

Pada akhirnya, stok CBP sering menipis dan pada akhirnya dilakukan impor beras untuk CBP. Jadi solusinya klasik, impor lagi, impor lagi. Maka harus dibenahi dahulu sistem di Bulognya.

Pembenahan itu, kata Huda, terutama sistem pemberian bantuan pangan yang selama ini mengandalkan beras impor. Itu sangat disayangkan sebab semestinya menggunakan hasil produksi petani sendiri. “Jadi yang bisa dilakukan adalah memperbaiki sistem penyerapan gabah/beras dari petani di mana saat ini harga pembelian pemerintah (HPP) menjadi ganjalan. Perubahan HPP dari *fix* menjadi *range* saya rasa bisa dilakukan,” tegas Huda.

Saat ini, terangnya, pembelian gabah dari petani sering mentok dengan harga maksimal HPP yang berlaku. Padahal harga gabah sangat fluktuatif mengikuti kondisi pasar.

“Jika ada *range*, saya rasa bisa membuat Bulog lebih leluasa untuk menyerap gabah dari petani,” katanya.

Dari Yogyakarta, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, menegaskan cara menggenjot produksi lokal ialah melalui penguatan kelembagaan petani. Kemudian, perluasan areal pertanian yang didukung dengan pemanfaatan teknologi. Terakhir, perlu memberi insentif bagi petani melalui kebijakan subsidi dan harga, perbaikan tata niaga dan distribusi hasil pertanian. ■ YK/ers/E-9

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Title	Pejabat PBB: Tiongkok Telah Membawa Manfaat Nyata bagi SIDS	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	12	
Author	YK/N-3	

Strategi Pembangunan

Pejabat PBB: Tiongkok Telah Membawa Manfaat Nyata bagi SIDS

ST JOHN'S – Tiongkok telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Negara-negara Berkembang Kepulauan Kecil atau Small Island Developing States (SIDS) melalui Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra atau *Belt and Road Initiative* (BRI) dan Inisiatif Pembangunan Global atau *Global Development Initiative* (GDI). Demikian dikatakan Li Junhua, Under-Secretary-General Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, seperti dikutip dari *Antara*, Minggu (2/6).

Tiongkok telah berinvestasi dalam berbagai proyek infrastruktur yang meningkatkan kapasitas energi terbarukan dan mendukung mitigasi perubahan iklim sembari terlibat dalam proyek-proyek untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di SIDS.

Sejak 2018, Tiongkok menyetujui dan mengimplementasikan sekitar 200 proyek kerja sama dengan SIDS di berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, infrastruktur, layanan medis, dan kesehatan.

Konferensi Internasional tentang Negara-negara Berkembang Kepulauan Kecil keempat ditutup di Antigua dan Barbuda pada Kamis (30/5) dengan diadopsinya Agenda Antigua dan Barbuda untuk SIDS (Antigua and Barbuda Agenda for SIDS/ABAS).



FOTO: PBB/LOEY FELIPE

Li Junhua, Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Ekonomi dan Sosial, menyampaikan pidato pada dialog informal Majelis Umum mengenai pembangunan ketahanan global dan mendorong pembangunan berkelanjutan melalui konektivitas infrastruktur. Pertemuan tersebut diadakan pada Pekan Keberlanjutan Majelis Umum (15-19 April).

Ketahanan Ekonomi

ABAS mencakup berbagai bidang termasuk perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, perlindungan lingkungan, keanekaragaman hayati, transisi energi, dan ekonomi digital, yang bertujuan membantu SIDS dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

Meskipun banyak kemajuan nyata telah dicapai di SIDS selama 10 tahun terakhir dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan, tetapi masih ada sejumlah tantangan seperti perubahan

iklim, utang yang terus membengkak, serta krisis kesehatan.

"Mengingat kerentanan unik dan keterbatasan sumber daya mereka, SIDS tidak dapat mengatasi tantangan besar yang mereka hadapi sendiri," katanya.

Li mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan pembiayaan dan investasi di SIDS, di bidang adaptasi iklim, ketahanan bencana, energi terbarukan, dan proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan.

Menurut Li, untuk membangun solidaritas dan mengatasi tantangan bersama,

negara-negara berkembang dapat memainkan peran kunci dalam mendukung SIDS melalui kerja sama Selatan-Selatan, berbagi pengetahuan mengenai kebijakan ketahanan iklim, menyediakan pengembangan kapasitas di bidang pertanian berkelanjutan, serta mendorong kewirausahaan, investasi, dan akses pasar.

Kerja sama yang berlandaskan pada prinsip saling menguntungkan, didorong oleh kebutuhan SIDS, dan dilengkapi dengan kemitraan multilateral dapat mendorong pembangunan berkelanjutan di SIDS, tuturnya. ■ YK/N-3

Title	TARGET MENANTANG DI BLOK ROKAN	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	5	
Author	Lili Sunardi & Nyoman A. Wahyudi	

| PRODUKSI MINYAK & GAS BUMI |

TARGET MENANTANG DI BLOK ROKAN

Keberhasilan PT Pertamina (Persero) mengelola Blok Rokan dan menjadikannya sebagai wilayah kerja minyak dan gas bumi terproduktif di Tanah Air tidak cukup untuk membuat Presiden Joko Widodo puas. Target khusus menanti untuk dicapai sejalan dengan berbagai keberhasilan yang dicatatkan.

Lili Sunardi & Nyoman A. Wahyudi
redaksi@bisnis.com

Presiden Joko Widodo menargetkan produksi minyak bumi dari Blok Rokan mampu di atas 200.000 barel per hari, lebih tinggi dari capaian saat ini yang sebanyak 162.000 barel per hari. Keberhasilan sejumlah proyek pengeboran menjadi acuan bagi Kepala Negara untuk menetapkan target lanjutan terhadap produsen minyak terbanyak di Nusantara itu.

Pencapaian yang ditorehkan oleh PT Pertamina Hulu Rokan sebagai kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Blok Rokan, kata Presiden, sebagai hal yang positif karena mencapai sekitar 25% dari total produksi nasional.

"Saya memberikan target agar [produksi minyaknya] bisa di atas 200.000 barel per hari. [Teknologi baru] Sudah dicoba [pengembangan] satu sumur baru dan menghasilkan produksi yang berlipat. Ini akan dikembangkan untuk sumur-sumur lain yang dipilih, sehingga nanti produksinya bisa meningkat drastis," katanya akhir pekan lalu.

Berdasarkan catatan Pertamina, Pertamina Hulu Rokan memang terus mengakselerasi kegiatan eksplorasi dan pengembangan melalui berbagai terobosan. Tidak hanya terfokus pada peralatan operasional, aksi yang dilakukan perusahaan juga fokus kepada aspek

pengembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), serta investasi pengembangan bisnis dan non-bisnis.

Beberapa inisiatif yang dijalankan Pertamina Hulu Rokan adalah optimasi *rig drilling cycle time*, *rig WOWS cycle time*, *well clustering* program pengeboran, penambahan jumlah rig efektif, hingga meningkatkan sumur dan kerja ulang.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, perseroan aktif menjalankan program pengeboran di Blok Rokan, sehingga produksinya mampu melampaui catatan yang ditorehkan oleh Chevron saat mengelola wilayah kerja tersebut.

Menurutnya, saat ini Blok Rokan menjelma sebagai salah satu wilayah kerja yang memiliki peranan penting dalam pembangunan kedaulatan, serta ketahanan dan kemandirian energi nasional.

"Pertamina bersama putra-putri terbaik bangsa berhasil mengelola Blok Rokan secara profesional sesuai dengan standar pengelolaan energi kelas dunia," katanya.

Menurutnya, saat ini minyak bumi yang diproduksi dari blok migas mesti diolah untuk menghasilkan produk berkualitas dan didistribusikan dengan adil ke seluruh pelosok negeri.

Blok Rokan sendiri merupakan wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) yang memiliki lebih dari 11.000 sumur

aktif, dan 13.000 kilometer jaringan pipa yang setara dengan dua kali jarak Sabang—Merauke. Lebih dari 11 miliar barel minyak mentah telah diproduksi dari WK Rokan melalui sejumlah lapangan-lapangan besar, di antaranya Minas, Duri, Bangko, Bekasap, Balam South, Kotabatak, Petani, Pematang, Petapahan dan Pager.

PENGEBORAN

Adapun Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut keberhasilan Blok Rokan menjadi produsen minyak bumi terbanyak di Indonesia tidak lepas dari program kerja pengeboran yang masif sejak alih kelola hingga saat ini.

"Kami berharap seluruh program kerja yang sudah disetujui oleh SKK Migas dapat dilaksanakan, sehingga amanat Presiden agar produksi Blok Rokan dapat meningkat dapat direalisasikan," kata Wakil Kepala SKK Migas Shinta Damayanti, Minggu (2/6).

Tidak hanya di Blok Rokan, Shinta berharap seluruh KKKS bisa memacu kinerjanya dalam menyelesaikan sejumlah proyek hulu migas maupun program yang telah disepakati dalam *work, program & budget* (WP&B).

"Termasuk diharapkan KKKS yang menemukan sumber-sumber migas yang baru untuk dapat mempercepat proses



Saya memberikan target agar [produksi minyaknya] bisa di atas 200.000 barel per hari.

penyiapan *plan of development* [PoD], sehingga cadangan tersebut dapat segera diproduksi," katanya.

Di sisi lain, SKK Migas tahun ini menargetkan investasi pemboran eksplorasi sebesar US\$1,8 miliar atau naik 100% dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu yang sebanyak US\$ 0,9 miliar. Sepanjang Januari—April 2024, realisasi pengeboran sumur eksplorasi yang berhasil dituntaskan oleh KKKS pun sudah mencapai 16 sumur atau naik 229% dari tujuh sumur pada periode sama tahun lalu.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan, tidak hanya mengincar penamban sumur eksplorasi, tahun

ini lembaganya juga mengincar temuan besar melalui *shifting* dari *small—medium* ke *medium—large*.

Secara terpisah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan torehan *lifting* migas awal tahun ini meleset dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, torehan *lifting* minyak bumi pada Januari—Maret 2024 berada di level 567.650 barel minyak per hari (bopd). Realisasi itu baru mencapai 89,4% dari target APBN 2024 yang dipatok di level 635.000 bopd.

Sementara itu, capaian salur gas kuartal pertama 2024 baru mencapai 885,46 juta barel setara minyak per hari (boepd). Torehan itu mengambil porsi 85,7% dari target APBN yang ditetapkan sebesar 1.033 juta boepd.

Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa kementeriannya tengah mendorong peningkatan pengeboran pengembangan, *workover*, dan *well services* di aset-aset yang tersedia saat ini. Harapannya, kata Dadan, *lifting* migas bisa ditingkatkan nantinya sampai akhir tahun nanti.

"Termasuk mereaktivasi sumur-sumur *idle*, dan percepatan PoD serta percepatan *onstream* proyek-proyek hulu migas," kata Dadan saat rapat dengar pendapat dengan DPR. □

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Title	TRADE PANGAN AMATI LANGKAH MODI	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	14	
Author	Sri Mas Sari	

| EFEK PEMILU INDIA |

TRADER PANGAN AMATI LANGKAH MODI

Pasar komoditas pertanian mewaspadaai potensi perubahan kebijakan perdagangan India setelah pemerintahan baru mulai menjabat bulan ini. Perubahan itu dapat berdampak signifikan terhadap harga pangan global.

Sri Mas Sari
sri.mas.sari@bisnis.com

Negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia ini telah membatasi pasokan pangan penting, seperti gula dan beberapa varietas padi utama ke pasar global selama lebih dari setahun. Perdana Menteri Narendra Modi berupaya memastikan pasokan dalam negeri mencukupi, guna mengurangi biaya konsumen menjelang pemilu nasional. Janji itu sesungguhnya mengingkari komitmennya untuk 'memberi makan dunia' setelah invasi Rusia ke Ukraina. India juga menahan diri untuk tidak memangkas pajak impor gandum guna memenangkan para petani, yang merupakan blok pemungutan suara yang besar. Harga beberapa komoditas pertanian telah melemah dari level tertingginya. Dilansir Bloomberg, lembaga-lembaga negara di India melakukan tindakan keras terhadap penimbunan dan penjualan sejumlah biji-bijian di luar mekanisme cadangan negara. Hal ini meningkatkan kemungkinan perubahan pembatasan setelah hasil pemilu

diumumkan pada 4 Juni. Namun, juru bicara yang mewakili kementerian pangan dan perdagangan tidak segera berkomentar. Pelonggaran apa pun dalam ekspor dapat menurunkan harga beras acuan Asia yang mendekati level tertinggi dalam 15 tahun terakhir (*Lihat infografik*). Relaksasi juga dapat mempercepat penurunan harga gula. Namun, kenaikan harga gandum berjangka di Chicago dapat dipicu lebih lanjut jika pemerintah menerima permintaan industri untuk memotong pungutan impor guna meningkatkan pasokan lokal. India telah melarang pengimporan beras putih pecahan (*broken*), selain mengenakan pajak sebesar 20% untuk jenis beras setengah matang. Langkah tersebut, yang telah menekan pasokan global dan makin meningkatkan harga dunia, merupakan pukulan besar bagi beberapa negara di Afrika Barat dan Timur Tengah yang bergantung kepada India untuk sebagian besar kebutuhan pangan pokok mereka. "Penggilangan beras India hendak meminta pemerintahan

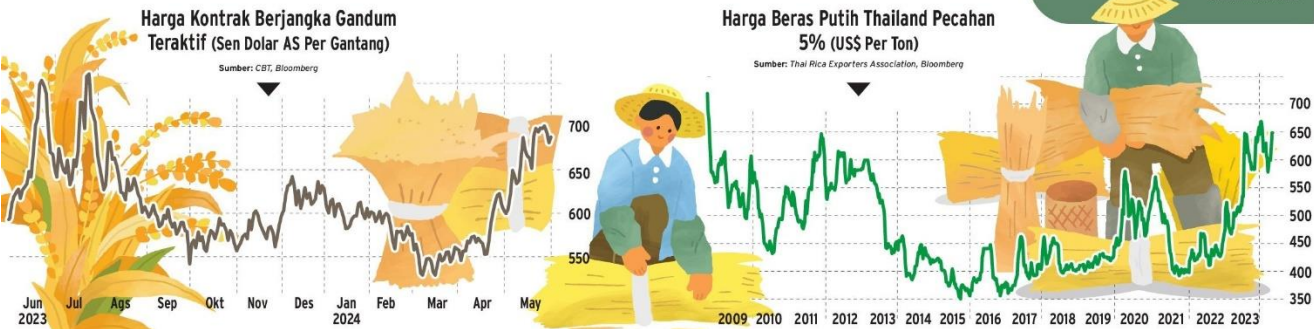
baru untuk mengizinkan ekspor beras *broken*," kata Presiden Asosiasi Eksportir Beras. B.V. Krishna Rao. Menurutny, industri ini baik-baik saja dengan pungutan, tetapi pembatasan harus dicabut. Dia menambahkan, persediaan beras melimpah di negaranya dan prakiraan musim hujan yang di atas normal meningkatkan prospek panen pada 2024—2025. **LOBI INDUSTRI** Sementara itu, kalangan industri telah melobi pemerintah untuk mengurangi bea masuk gandum sebesar 40% agar pembelian di luar negeri dapat dilakukan, hal yang belum pernah dilakukan India dalam skala besar sejak 2017—2018. Pasokan lokal menjadi lebih ketat karena pembelian besar-besaran oleh lembaga-lembaga negara untuk berbagai inisiatif kesejahteraan. Akibatnya, harga eceran gandum dan tepung naik sekitar 5% dari tahun sebelumnya. Di pasar global, gandum berjangka di Chicago telah melonjak lebih dari 9% sepanjang tahun ini. Wakil Presiden Senior Roller Flour Millers' Federation

of India Navneet Chitlangia mengatakan, negaranya perlu mengimpor 2 juta hingga 3 juta ton gandum tahun ini dari pasar luar negeri untuk meningkatkan ketersediaannya di pasar domestik, dan menciptakan penyangga. Dinas Pertanian Luar Negeri Departemen Pertanian Amerika Serikat telah memperkirakan impor gandum India sebesar 2 juta ton pada musim yang dimulai pada 1 April, karena permintaan lokal yang stabil. Kekhawatiran pabrik-pabrik penggilingan tepung dan pembuatan roti mengenai berkurangnya stok akan terus berlanjut selama berbulan-bulan. Kecemasan itu dilatarbelakangi oleh penaburan benih untuk tanam berikutnya yang baru akan dimulai pada Oktober dan November, sedangkan panen baru akan dimulai pada Maret 2025. Pada gula, India yang merupakan produsen terbesar kedua di dunia ini memperpanjang pembatasannya setelah Oktober. Mereka memperkenalkan sistem baru pada 2022—2023, dan membatasi ekspor menjadi sekitar 6 juta ton dibandingkan dengan

11 juta ton tanpa pembatasan pada tahun sebelumnya. Negara ini belum mengumumkan kuota tahun ini. Menurut Direktur Jenderal Asosiasi Produsen Gula dan Bio-energi India Deepak Ballani, India memiliki cadangan yang cukup untuk konsumsi lokal, serta ekspor 2 juta ton pada musim ini. "Kami berharap pemerintah mengizinkan ekspor seperti yang kami minta," ujarnya. Ballani melanjutkan, curah hujan yang baik sebelum musim hujan (*pre-monsoon*) dan perkiraan curah hujan di atas normal tahun ini tidak hanya akan memastikan pasokan yang cukup untuk konsumsi domestik, tetapi juga memper-tahankan program pencampuran etanol. ■

Harga beras di pasar global tetap tinggi. Cuaca yang tidak menentu mengganggu panen petani di negara-negara produsen utama. Sementara, harga gandum tengah reli. Para petani di Rusia dan Ukraina memperkirakan panen yang lebih sedikit akibat cuaca kering.

BISNIS/ALIMRON GHOZALI



Title	Bapanas Pelototin Harga Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	10	
Author	NOV	

Cegah Kenaikan Jelang Idul Adha

Bapanas Pelototin Harga Pangan

Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan kewajaran harga pangan pokok strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha pada 17 Juni 2024. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni dengan melakukan analisa kondisi harga pangan secara nasional, termasuk di tingkat konsumen.

KEPALA Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya melakukan analisa kondisi harga pangan secara rutin.

"Data harga-harga tersebut merupakan himpunan dari total 1.503 *enumerator* se-Indonesia mulai dari tingkat produsen, konsumen sampai grosir," ungkap Arief dalam keterangan resmi Bapanas, Minggu (2/6/2024).

Lebih lanjut dijelaskan Arief, mengacu pada harga pangan strategis rata-rata nasional di tingkat konsumen per 29 Mei 2024, komoditas beras medium dan premium di zona 2 dan 3, perlu dilakukan intervensi. Hal ini menimbang harga yang tercatat melebihi 5,89 persen

sampai 15,54 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sementara untuk komoditas bawang merah, minyak goreng curah, gula konsumsi dan beras medium zona 1 dikategorikan dengan status waspada.

"Tentunya berbagai program intervensi ke pasar secara terus menerus dilaksanakan Pemerintah. Bulan Juni ada Hari Raya Idul Adha yang biasanya akan pengaruhi harga pangan, sehingga jadi fokus kita dalam memastikan pasokan dan harga yang baik dan stabil," ujar Arief.

Arief menuturkan, melalui Perum Bulog, Bapanas telah menugaskan pelaksanaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) baik di tingkat konsumen maupun ritel modern.



Arief Prasetyo Adi

Per 29 Mei 2024, realisasi beras SPHP di tingkat konsumen telah mencapai 729 ribu ton dari target 1,2 juta ton.

Sementara realisasi beras SPHP ke ritel modern sudah 50 ribu ton dengan 3 besar penyaluran ke Indomaret, Indogrosir dan Alfamart.

Arief mengatakan, program intervensi lainnya juga dilakukan Pemerintah dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM). "GPM adalah instrumen anda-

lan penstabilan kondisi pangan nasional," sambungnya.

Pada periode Januari sampai Mei 2024, total GPM telah dihelat 4.695 kali di 37 provinsi dan 410 kabupaten/kota.

"Ini akan terus diintensifkan terutama menjelang HBKN Idul Adha," pungkas Arief.

Inspeksi Pasar

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan stok bahan pokok untuk

menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, masih aman dengan harga terkendali, setidaknya di Kabupaten Bandung Barat.

"Masyarakat tak perlu khawatir," kata Zulkifli di Pasar Tagog Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2024).

Saat melakukan inspeksi ke Pasar Tagog Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Mendag mengecek satu per satu harga bahan pokok mulai harga beras, ayam potong, bawang merah, bawang putih, cabe dan berbagai kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

Zulkifli menilai, harga-harga sembako di Pasar Tagog Padalarang sudah bagus karena di bawah rata-rata.

"Kita bersyukur, semua lihat sendiri tadi, harga cabe di bawah Rp 40.000 per kg, bawang putih Rp 40.000, bawang merah Rp 40.000, Ayam terlalu murah Rp 34.000 per kg sudah dipotong. Ayam kalau siang agak murah, kalau pagi capai Rp 35.000," pungkasnya. ■ NOV

Title	Jagung Gorontalo Tembus Pasar Filipina	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	10	
Author	Rakyat Merdeka	

Jagung Gorontalo Tembus Pasar Filipina

INDONESIA mengekspor perdana 50 ribu ton jagung ke Filipina. Kegiatan ekspor ini dilakukan seiring meningkatnya produktivitas jagung hasil tanam petani di berbagai daerah di Provinsi Gorontalo.

Selain diekspor ke Filipina, lebih dari 250 ribu ton jagung Gorontalo juga dikirim antar pulau untuk memenuhi kebutuhan jagung nasional, khususnya untuk pakan ternak.

Produksi jagung di Gorontalo meningkat 52,8 persen pada 2024 sehingga bisa berkontribusi pada kebutuhan nasional dan ekspor. ■

Tittle	PANTAU HARGA BAHAN POKOK	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	10	
Author	Rakyat Merdeka	



PANTAU HARGA BAHAN POKOK:
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan didampingi Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meninjau harga dan stok pangan di Pasar Tagog, Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2024).

DOK. KEMENDAG

Title	EUDR Berpotensi Jegal Ekspor Indonesia	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	4	
Author	Leonard AL Cahyoputra	

EUDR Berpotensi Jegal Ekspor Indonesia

JAKARTA, ID - Undang-Undang Antideforestasi Uni Eropa (UE) atau *European Union Deforestation-Free Regulations* (EUDR) akan berlaku pada 2025 mendatang. Kebijakan tersebut berpotensi menghambat ekspor Indonesia ke kawasan benua biru.

Oleh **Leonard AL Cahyoputra**

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menerangkan, pihaknya mendukung advokasi pemerintah Indonesia agar pemerintah EUB bisa menunda atau merevisi aturan EUDR. Hal ini agar lebih berimbang dan adil terhadap produk ekspor agrikultur asal Indonesia. "Dengan adanya kebijakan ini, ekspor Indonesia mengalami ancaman penurunan kinerja yang signifikan. Ini karena produk-produk ekspor unggulan nasional seperti CPO dikategorikan dalam *red list*," kata dia kepada *Investor Daily*, Jakarta, Minggu (2/6/2024).

Selain itu, terang Shinta, ketentuan *geolocation* dan *traceability* yang dituntut atas berbagai komoditas ekspor agrikultur dalam EUDR juga belum tentu bisa diciptakan oleh semua eksportir Indonesia di 2025. "Sehingga kinerja ekspor ke UE terancam turun tajam. Penurunannya berapa, kami belum bisa sampaikan, karena saat ini banyak perusahaan yang masih mengupayakan *compliance* terhadap EUDR," ucap dia.

Shinta mengemukakan, sebagai *stakeholders*, pelaku usaha menghormati kebijakan EUDR sebagai salah satu bentuk *market requirements* UE. Berhubung kebijakan tersebut berlaku efektif pada tahun depan, tentunya Apindo berupaya mendukung kelancaran berlakunya kebijakan EUDR dengan menciptakan *compliance* yang dituntut oleh kebijakan tersebut.

Saat ini Apindo intensif melakukan koordinasi secara internal maupun ek-

sternal, termasuk dialog dengan *buyers* di UE, pemerintah Indonesia dan perwakilan UE di Indonesia. Hal ini untuk mempelajari dan mengsosialisasikan kebijakan ini kepada seluruh pelaku usaha dan eksportir Indonesia yang memiliki target pasar UE. "Agar ketika kebijakan EUDR diberlakukan secara efektif, semua eksportir Indonesia bisa menciptakan *compliance* yang dibutuhkan dan ekspor Indonesia ke UE tetap berjalan lancar mungkin," kata dia.

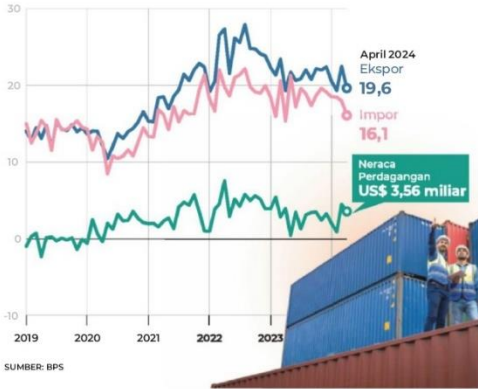
Shinta menerangkan, EUDR tidak hanya berdampak pada kinerja ekspor Indonesia ke UE, melainkan juga secara langsung menurunkan inklusivitas ekspor Indonesia ke UE. Ini karena kemampuan pemahaman, penguasaan teknologi dan kemampuan *compliance* para petani plasma dan *small holders* perikanan, pertanian dan perkebunan yang ada dalam *supply chain* ekspor Indonesia ke UE masih sangat terbatas untuk bisa menciptakan laporan *traceability* dan *geolocation* yang dituntut oleh EUDR. "Dengan berlakunya kebijakan tersebut tahun depan, *small holders* dan petani plasma ini tentu akan terkesampingkan, tidak bisa mengekspor karena dinilai tidak *comply*. Akibatnya ekspor ke UE menjadi eksklusif dan hanya bisa dilakukan oleh perusahaan/eksportir besar saja, karena beban penciptaan *compliance*-nya terlalu besar," kata dia.

Jangan Diskriminasi

Shinta menjelaskan, dunia usaha sangat ingin mendukung kebijakan iklim dan biodiversitas UE. Ini karena intensi dari kebijakan ini sangat positif untuk mencegah perubahan krisis iklim. Namun, Apindo sangat berharap implementasi kebijakan UE tersebut

Neraca Perdagangan Surplus US\$ 3,56 Miliar

Perkembangan ekspor, impor dan neraca perdagangan dalam empat tahun terakhir. Neraca perdagangan Indonesia masih surplus US\$ 3,56 miliar pada April 2024. Namun angka itu mengecil 10,6% dari bulan lalu yang mencapai US\$ 4,47 miliar.



tidak menciptakan diskriminasi dalam perdagangan, tidak menciptakan peningkatan *cost* perdagangan yang tinggi. "Selain itu, mudah *di-comply* oleh eksportir di negara berkembang, khususnya eksportir yang memiliki skala usaha kecil-menengah dengan kemampuan *compliance*-nya terbatas. Kemudian, tetap mengindahkan dan mengutamakan penciptaan efisiensi *supply chain* perdagangan," ucap dia.

Apindo sangat berharap UE dan Indonesia dapat menciptakan kerjasama yang lebih dalam dan ekstensif. EUDR dapat dikerjasamakan secara positif untuk pertumbuhan Indonesia, misalnya dengan pengembangan *Mutual Recognition Agreements* (MRAs) antara Indonesia dan UE dalam hal berbagai sertifikasi hijau atau *sustainability assessment* yang dibutuhkan untuk menciptakan *compliance* terhadap kebijakan EUDR.

Shinta mengungkapkan, beberapa

sertifikasi *sustainability* Indonesia seperti SVLK dan ISPO bisa menjadi pilot kerjasama MRAs ini untuk memastikan ekspor-eksportir *existing* Indonesia ke UE tetap berjalan lancar. Selanjutnya, bisa dikembangkan ke kerja sama standar-standar atas produk lain, seperti produk perikanan, kehutanan, perkebunan. "Jadi kami sangat berharap pemerintah juga agresif untuk menciptakan kerja sama bilateral yang dibutuhkan agar ekspor Indonesia ke UE tetap *seamless* dan efisien sekalipun EUDR tidak mengubah atau menunda kebijakan EUDR seperti yang kita harapkan," kata dia.

Tantangan Besar

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur menjelaskan, tahun lalu, nilai ekspor produk mebel dan kerajinan nasional mencapai US\$ 444 juta. Ekspor mebel dan kerajinan

pasti terpuak akibat EUDR. "Nilai itu akan berkurang jika Indonesia tidak mampu mengikuti persyaratan EUDR. EUDR memuat pelarangan masuknya tujuh produk komoditas yang dinilai menyebabkan deforestasi," kata dia.

Sobur menerangkan, EUDR memberi tantangan besar kepada pengusaha secara administratif yang memberikan *cost* yang tinggi. Kesiapan di lapangan, di Indonesia, belum memadai sehingga menghambat proses ekspor yang dikehendaki dan *feedback value export* tidak sebagai di Amerika Serikat. "EUDR sendiri akan memberikan *feedback* yang negatif terhadap negara Eropa sendiri yang sudah mengalami *declining* usaha yang dialami saat ini," ucap dia.

HIMKI berupaya membantu pengusaha mebel dan kerajinan dalam menghadapi isu-isu terkini seperti adanya peraturan yang ada di EUDR dan mendorong pemerintah untuk mengantisipasi dampak regulasi UE terkait deforestasi tersebut. "Pemerintah juga harus yang terdepan mengantisipasi dampak EUDR dengan melakukan perundingan kerja sama atau upaya-upaya lainnya," kata Sobur.

Dia mengatakan, pada Desember 2024, peraturan akan diberlakukan pada perusahaan besar, apabila syarat tidak terpenuhi, maka produk akan ditolak masuk ke pasar UE. Selanjutnya, pada Juni 2025, giliran perusahaan kecil dan menengah harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Akibat aturan itu, mulai 2025, sejumlah komoditas yang terpengaruh akibat EUDR adalah minyak sawit, sapi, kayu, kopi, kakao, karet hingga kedelai. Aturan itu juga berlaku untuk sejumlah produk turunan seperti cokelat, furniture, kertas cetak, dan turunan berbahan dasar minyak sawit lain.

"Prosedur EUDR yakni uji tuntas (*due diligence*) untuk ketertelusuran (*traceability*) produk, menyulitkan eksportir mebel dan kerajinan Indonesia menembus pasar UE. Anggota HIMKI yang jumlahnya lebih dari 2.500, tidak semuanya akan mampu mengikuti persyaratan EUDR," kata Sobur.

Tittle	Juni-Juli Masih Panen, Genjot Serapan Beras untuk Stok CBP	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	11	
Author	TI	

Juni-Juli Masih Panen, Genjot Serapan Beras untuk Stok CBP

JAKARTA, ID–Luas panen padi di Tanah Air diperkirakan masih 1,45 juta hektare (ha) dengan produksi beras 4,16 juta ton pada Juni-Juli tahun ini. Karenanya, serapan beras lokal demi menambah cadangan beras pemerintah (CBP) harus terus dilakukan oleh Perum Bulog. Dengan stok beras memadai, saat musim kering kembali melanda atau terjadi situasi pangan global yang tidak diinginkan, pemerintah mampu mengatasinya dengan menyalurkan CBP guna membantu masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program, seperti bantuan pangan beras (BPPB).

Sesuai Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS) amatan April 2024, produksi beras RI Januari-Juli tahun ini diperkirakan 18,74 juta ton, surplus (produksi-konsumsi) 650 ribu ton (0,65 juta ton). Rincian per bulannya, antara lain, luas panen April 2024 sekitar 1,71 juta ha dengan produksi beras 5,31 juta ton dan surplus 2,74 juta ton, di Mei 1,26 juta ha dengan produksi 3,58 juta ton dan surplus 1,01 juta ton, pada Juni 704 ribu ha dengan produksi 2,01 juta ton dan defisit 0,57 juta ton, serta Juli 742 ribu ha dengan produksi 2,15 juta ton dan defisit 0,43 juta ton.

Mengutip dari Global Report On Food Crises 2024 yang disusun Food Security Information Network (FSIN) dan Global Network Against Food Crises, cuaca ekstrem menjadi salah satu penyebab utama kerawanan pangan akut tingkat tinggi bagi sedikitnya 18 negara dengan lebih dari 72 juta penduduk di 2023. Padahal, pada 2022, hanya 12 negara dengan 56,8 juta penduduk yang terdampak rawan pangan akut. Di sisi lain, El Nino dan fenomena cuaca perubahan iklim telah menjadikan 2023 sebagai tahun terpanas. Dalam proyeksi 2024, banjir dan cuaca ekstrem akibat angin muson dan angin topan masih menjadi kekhawatiran, terutama di kawasan Asia.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan, dengan situasi itu, pemerintah memastikan terus memantau stok CBP dalam kondisi baik (cukup). Per 28 Mei 2024, stok CBP yang dikelola Bulog 1,8 juta ton. Bapanas meyakini angka itu akan terus bertambah karena Bulog konsisten menyerap hasil panen dalam negeri. "Estimasi panen beras menurut KSA BPS masih ada surplus. Ini memang waktunya CBP terus ditambah agar pemerintah leluasa menyalurkannya dalam membantu masyarakat saat nanti kemarau," kata Arief. Realisasi penyerapan beras produksi lokal oleh Bulog per 26 Mei 2024 menyentuh 601 ribu ton, yakni CBP 517 ribu ton dan komersial 83 ribu ton. Sepanjang 2023, realisasi pengadaan beras dalam negeri Bulog 1,07 juta ton.

Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengatasi kerawanan pangan dan menekan inflasi beras adalah BPPB yang bersumber dari CBP. "Kita pahami, program BPPB ini terus kita jalankan dan bersumber dari stok CBP," papar Arief. Untuk itu, penguatan stok CBP di saat produksi dalam negeri sedang berlangsung menjadi atensi utama pemerintah. "Ini karena kita ingin di masa depan saat musim kering melanda atau terjadi suatu kondisi pangan global, kita mampu mengatasinya dengan penyaluran CBP guna membantu masyarakat melalui berbagai program," jelas Arief.

BPPB kini telah memasuki tahap kedua (April-Juni) di 2024 dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memantau penyaluran BPPB di Gudang Bulog Toba Pingin, Lubuklinggau, Sumatra Selatan, pada 30 Mei 2024, memberi sinyal keberlanjutan program itu sampai tahap ketiga. "Juni terima (BPPB) lagi. Saya akan lihat fiskal APBN, Juni akan saya umumkan, tapi melihatnya bisa dilanjutkan. Ini berasnya kualitas premium, lebih bagus dari yang saya makan. Kalau ada keluhan, silakan (sampai) ke Bulog," ujar Jokowi dalam keterangan yang dikutip Minggu (02/06/2024).

HET Beras

Di sisi lain, usai meninjau harga pangan di Pasar Senggol Kota Dumai, Riau, pada 1 Juni 2024, Presiden menjelaskan, stok beras nasional terkini di gudang Bulog sangat melimpah atau sekitar 1,8 juta ton, biasanya hanya 0,9-1,2 juta ton. Namun, hal itu tidak serta merta membuat harga eceran tertinggi (HET) beras langsung turun, sebab biaya usaha tani padi melesat. "HET sulit turun meski produksi sudah melimpah karena panen raya. Ini karena biaya agroinput meningkat. Biaya yang dikeluarkan petani untuk sewa lahan, pupuk, bibit, dan tenaga kerja semuanya naik. Masyarakat harus maklum karena petani juga mesti dapat keuntungan demi kesejahteraan, tapi harga di masyarakat jangan terlalu tinggi, wajar. Mencari keseimbangan itu tidak gampang, masyarakat senang, petani senang," papar Jokowi.

Karena itulah, Bapanas, melalui surat Kepala Bapanas No 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024 yang ditujukan ke para pemangku kepentingan perberasan, memperpanjang relaksasi HET beras medium dan premium hingga terbitnya Perbadan tentang Perubahan atas Perbadan No 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras. Dengan begitu, per 1 Juni 2024, relaksasi HET beras medium dan premium yang sudah sekian kali diperpanjang berlaku kembali. Rinciannya, antara lain, HET beras medium dan premium di Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan, masing-masing menjadi Rp 12.500 per kilogram (kg) dan Rp 14.900 per kg. (td)

Tittle	Kekeringan dan Hama Ancam Sawah di Jawa Barat	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	7	
Author	UL/AD/J-3	

Kekeringan dan Hama Ancam Sawah di Jawa Barat

SEBANYAK 38 desa di 21 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berpotensi terancam kekeringan pada musim kemarau ini. Pemkab Cirebon pun melakukan antisipasi bencana kekeringan di musim kemarau tahun ini.

Sub Koordinator Kebencanaan Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, Juwanda, menjelaskan data tersebut diperoleh berdasarkan desa yang terdampak kekeringan tahun lalu.

“Saat ini pun wilayah pantura Jawa Barat, termasuk Kabupaten Cirebon sudah memasuki musim kemarau,” tutur Juwanda, kemarin.

Berdasarkan informasi dari BMKG, secara umum pada awal Juni sudah masuk musim kemarau dan menuju puncaknya pada Agustus nanti. Bupati Cirebon pun sudah meneken surat keputusan (SK) kesiapsiagaan bencana kekeringan, kekurangan air bersih, serta kebakaran lahan dan hutan (karhutla) sebagai panduan antisipasi bencana akibat musim kemarau.

SK itu berlaku sejak 1 Juni hingga 31 Oktober 2024. Selain itu, BPBD Kabupaten Cirebon juga telah menyiapkan alat pemadam kebakaran hutan dan lahan serta sarana dan prasarana untuk distribusi air bersih.

Selain bencana kekeringan, warga juga menghadapi ancaman hama. Lahan pertanian seluas 2 hektare di Kampung Ciwaas Depok, Cilempay, Cieurih, Sukarate, Gobras 3, dan Cikadu, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, gagal panen terserang hama wereng. Kejadian tersebut menyebabkan sejumlah petani harus menelan kerugian puluhan juta rupiah.

Akibatnya, hasil panen gabah kering pungut (GKP) dan gabah kering giling (GKG) yang mereka dapatkan anjlok drastis. Ubad Subradio, 73, warga Kampung Ciwaas Depok mengatakan, dari 70 bata lahan yang dimilikinya, GKP yang didapat hanya 1,8 kuintal akibat terserang hama. Padahal, normalnya dengan luas tersebut, ia dapat memanen 4 kuintal GKP.

“Lahan pertanian yang terserang hama wereng hampir semua daerah di Tamansari tidak bisa panen, karena serangannya sangat sporadis membuat batang keropos, menghitam, daun menguning, dan butir padi hampa. Berbagai upaya pernah dilakukannya dengan menyemprotkan pestisida tapi hama malah menyerang lahan lainnya,” katanya, kemarin.

Selain itu, ia pun kecewa terhadap kinerja petugas pertanian yang belum juga terjun untuk mengantisipasi masalah ini. Ia berharap ada solusi yang bisa diberikan untuk mencegah kerugian terulang kembali di musim tanam selanjutnya. (UL/AD/J-3)

Tittle	Pemerintah Akui HET Beras Sulit Turun	
Date	3 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	8	
Author	Try/E-2	

Pemerintah Akui HET Beras Sulit Turun

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengakui harga eceran tertinggi (HET) beras sulit turun meski produksi panen raya sudah meningkat. Alasannya, kegiatan industri yang memproduksi barang dan jasa untuk keperluan usaha pertanian mengalami kenaikan biaya.

“Seperti biaya untuk sewa lahan, pupuk, bibit, tenaga kerja, semuanya naik,” kata Jokowi usai mengecek kestabilan harga pangan di Pasar Senggol, Kota Dumai, Riau, Sabtu (1/6).

Presiden mengaku sulit mencari jalan tengah antara keinginan beras murah di masyarakat dan perlunya petani mendapat untung.

“Itu wajar. Mencari keseimbangan seperti itu yang tidak gampang. Masyarakat senang, petani senang,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali memperpanjang relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras

medium dan premium. Perpanjangan itu tercantum dalam surat Bapanas No 160/TS.02.02/K/5/2024.

“Relaksasi kita perpanjang sambil kita tunggu Peraturan Bapanas,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat dihubungi Sabtu (1/6).

Perpanjangan relaksasi itu, sambungnya, dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan serta harga beras premium dan beras medium di pasar tradisional maupun retail modern.

Pada wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan diberlakukan relaksasi HET beras premium menjadi Rp14.900 per kg dari HET sebelumnya Rp13.900 per kg. Lalu di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, relaksasi HET beras premium diberlakukan Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya

Rp14.400 per kg.

Kemudian wilayah Bali dan Nusa Tenggara, relaksasi HET beras premium Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya Rp14.400 per kg. HET itu juga berlaku sama di wilayah Nusa Tenggara Timur dengan relaksasi HET beras premium Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya Rp14.400 per kg.

Untuk wilayah Sulawesi, relaksasi HET beras premium menjadi Rp14.900 per kg dari HET sebelumnya Rp13.900 per kg. Lalu wilayah Kalimantan, relaksasi HET beras premium menjadi Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya Rp14.400 per kg.

Sementara itu, wilayah Maluku, relaksasi HET beras premium menjadi Rp15.800 per kg dari HET sebelumnya Rp14.800 per kg. Relaksasi HET beras premium untuk wilayah Papua juga sama dengan wilayah Maluku. (Try/E-2)

Title	Rencana B50 Prabowo Terancam Kandas
Date	3 Juni 2024
Media	Media Indonesia
Page	A4
Author	Insi Nantika Jelita



Rencana B50 Prabowo Terancam Kandas



PERKEBUNAN SAWIT: Kendaraan melintas di area perkebunan sawit milik salah satu perusahaan di Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Jika pemerintah memaksakan penetapan SK Datin, dalam empat tahun ke depan Indonesia diperkirakan kehilangan 2,8 juta hektare lahan sawit. Dampaknya, akan ada potensi kehilangan pendapatan di sektor hulu sawit yang mencapai Rp131 triliun per tahun.

INSI NANTIKA JELITA
insi@mediaindonesia.com

KETUA Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung menilai program biodiesel 50% (B50) yang disusun presiden terpilih, Prabowo Subianto, terancam kandas diwujudkan. Menurutnya, program itu terimpit regulasi mengenai lahan sawit. Aturan yang dimaksud ialah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang memuat data dan informasi (SK Datin) kegiatan usaha yang terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang perkebunan.

SK Datin berisi subjek hukum, jenis, dan lokasi kegiatan yang meliputi wilayah administratif, kawasan hutan dan kesesuaian ruang, luasan administratif areal terbuka, dan skema penyelesaian sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. Mengutip data Apkasindo, berdasarkan SK Datin Nomor 1-21, sebanyak 3,57 juta hektare (ha) lahan sawit teridentifikasi masuk kawasan hutan. Lahan pemilik kebun sawit yang masuk ke kategori hutan akan terganjal legalitas dan diwajibkan membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku.

"Kalau kita masih ngotot luas lahan sawit ini masuk ke kategori kawasan hutan, program Pak Prabowo B40, B50 hanya tinggal kenangan," ujar Gulat dalam diskusi publik bertajuk Pencegahan Maladministrasi dalam



- Tujuan dan Manfaat Strategis Kebijakan Biodiesel B50**
- Mengurangi ketergantungan energi fosil serta impor minyak mentah.
 - Untuk kemandirian dan ketahanan energi nasional.
 - Komitmen terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.
 - Konversi CPO menjadi biodiesel meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik berbasis pertanian dan menghemat devisa negara dari pengurangan impor BBM.
 - Pengembangan teknologi melalui riset dan kajian terkait penggunaan biodiesel B50 pada moda transportasi dan industri yang lebih luas.
 - Penciptaan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan produksi biodiesel.



Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit yang dilaksanakan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, pekan lalu.

Jika pemerintah memaksakan penetapan SK Datin, dalam empat tahun ke depan Indonesia diperkirakan kehilangan 2,8 juta ha lahan sawit. Dampaknya, akan ada potensi kehilangan pendapatan di sektor hulu sawit yang mencapai Rp131 triliun per tahun. Indonesia juga disebut akan kehilangan produksi minyak kelapa sawit (*crude palm oil* (CPO)) sebanyak 12 juta ton. Atas dasar itulah ambisi untuk mengejar program B50 diyakini sulit digapai.

"Kacau ini kalau saya pikir. Pak Prabowo bilang mau laksanakan B50. Mau dapat biodiesel dari mana kalau 12 juta ton CPO itu hilang," kata Gulat. Dia menjelaskan, dalam perhitungan Dewan Minyak Sawit Indonesia, untuk menerapkan program B50 dibutuhkan 16,24 juta ton CPO, 16,50 juta ton *fatty acid methyl ester* (FAME) dan bauran solar 33 juta kiloliter (kl) per tahun. Adapun jumlah CPO untuk kebutuhan industri di sektor pangan sebanyak 10,39 juta ton per tahun dan industri oleokimia sebanyak 2,27 juta ton per tahun.

"Jika masih menentapkan aturan LHK itu, apa yang terjadi pada B50?

Target Kebijakan Biodiesel B50 pada 2029 Terancam Gagal



Kita akan minus 1,2 juta ton CPO," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menjelaskan konsumsi CPO untuk pangan, biodiesel, dan oleokimia terus meningkat. Mengutip data Gapki, konsumsi minyak sawit dalam negeri naik dari 21,24 juta ton di 2022 menjadi 23,13 juta ton di 2023 atau tumbuh 8,90%.

Namun, itu tidak diimbangi dengan kinerja produksi. Produksi CPO selama empat tahun terakhir stagnan. Di 2023, hasil panen CPO sebesar 50 juta ton, hanya naik tipis dari 46,7 juta ton di 2022. Di 2021 dan 2020 produksi juga hanya 46,8 juta ton dan 47 juta ton.

Saat ini, Indonesia masih menjalankan B35. Program ini tercatat meningkatkan konsumsi minyak sawit sebesar 17,68%, dari 9,04 juta ton pada 2022 menjadi 10,65 juta ton di 2023. Dengan diimplementasikannya B35, konsumsi biodiesel selama 2023 telah melampaui penyaluran biodiesel dalam negeri. Di sisi lain, untuk program B40 diproyeksi membutuhkan 13 juta-14 juta ton CPO.

"Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Karena kalau produksi-

batas tidak naik, tapi konsumsi naik terus, yang akan dikorbankan ialah devisa kita atau ekspor," tegas Eddy.

Sekjen Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Ernest Gunawan mengatakan keberhasilan mandatori bauran biodiesel dan kelapa sawit terletak pada kesiapan seluruh pemangku kepentingan. Bila pemerintah berencana meningkatkan campuran minyak nabati ke solar, harus ada peningkatan kapasitas produksi CPO.

"Sayangnya, kapasitas produksi masih sama karena belum ada kepastian hukum. Ada beberapa anggota kami yang menunda, bahkan membatalkan membangun pabrik biodiesel," papar Ernest.

Pihaknya selaku produsen biodiesel mengaku siap memenuhi alokasi FAME sesuai permintaan pemerintah. Aprobi, ungkap Ernest, amat mengharapkan adanya kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan program penyaluran biodiesel.

"Yang paling penyaluran biodiesel sudah menjadi mandatori pemerintah, apabila terjadi kegagalan dalam pasokan dengan jumlah yang besar, akan sangat berbahaya bagi perekonomian karena harus impor bahan

bakar minyak (BBM)," tutur Ernest.

Potensi malaadministrasi

Ombudsman RI menemukan indikasi potensi malaadministrasi pada tata kelola industri kelapa sawit. Itu ditandai dengan adanya tumpang tindih regulasi. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, membeberkan ada beberapa regulasi yang membuat pelayanan publik pemerintah di industri kelapa sawit terganggu, seperti tumpang tindih izin lahan.

"Permasalahan itu seperti lahan kelapa sawit yang dianggap masuk kawasan hutan. Mau sampai kapan masalah ini berlanjut. Ini harus ditata tanpa ada pihak yang dirugikan," ucapnya.

Terkait persoalan tumpang tindih lahan dan kawasan hutan serta perizinan, Ombudsman melihat terdapat benturan regulasi dari pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang membingungkan petani dan pelaku usaha bidang sawit, mulai dari penunjukan, tata batas, pemetaan, hingga penetapan.

Yeka menyampaikan pihaknya telah memetakan masalah pada tata kelola industri kelapa sawit. Pertama, terkait lahan dan perizinan seperti kepastian izin lokasi lahan perkebunan sawit, terkendala isu antara lain *overlapping* kawasan hutan, hak guna usaha (HGU), dan adat.

Masalah berikutnya ialah mengenai tata niaga produk sawit yang mengalami kendala kebijakan *domestic market obligation* (DMO) untuk memenuhi kebutuhan CPO dalam negeri. Selain itu, pengolahan produk sawit juga terkendala kemiripan antara petani rakyat dan industri.

"Terkait harga, Ombudsman menemukan itu tidak dapat memberikan keuntungan bagi petani, masyarakat, bahkan pedagang minyak goreng sawit," bilang Yeka.

Sementara itu, mengenai jumlah aduan pada isu perkelapasawitan, Yeka menyebutkan pada kurun 2018-2024 setidaknya terdapat 239 aduan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman RI. Adapun tiga substansi aduan masyarakat tertinggi isu perkelapasawitan dengan substansi agraria ialah pertanian dan tata ruang (69 aduan), substansi perkebunan, pertanian, dan pangan (36 aduan), dan substansi penegakan hukum (24 aduan). (Z-11)

Title	Natural product	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	The Jakarta Post	
Page	4	
Author	AFP/Aditya Irawan	

Natural product



AFP/Aditya Irawan

Men harvest salt from seawater in a greenhouse, which allows year-round salt production and allows for a higher quality product, free from dust and rainwater, in Bungko, West Java, on Saturday.

Title	Mulai Musim Giling, SGN Targetkan 978 Ribu Ton Gula	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Jawa Pos	
Page	5	
Author	Bil/c17/dio	



BAHAN BAKU:
Petani menaikkan tebu ke truk di perkebunan kawasan Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Jatim, untuk dikirim ke PG Candi Baru beberapa waktu lalu. Sudah ada 15 pabrik gula di bawah naungan PT SGN yang memulai aktivitas penggilingan tebu.

Mulai Musim Giling, SGN Targetkan 978 Ribu Ton Gula

SURABAYA – PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) memulai musim giling tebu tahun ini. Hingga kemarin (2/6) sudah ada 15 pabrik gula (PG) yang memulai aktivitasnya.

Direktur Operasional SGN Dodik Ristiawan mengatakan, terbanyak ada di Jawa Timur sebanyak 12 pabrik. Lainnya, dua PG di Jawa Tengah dan satu pabrik di Sumatera Utara yang sudah memulai aktivitas. "Operasional giling didasarkan pada

kesiapan teknis pabrik gula dan ketersediaan pasokan BBT (bahan baku tebu) secara kuantitas maupun kualitas. Dalam waktu dekat jumlahnya akan bertambah," ujar Dodik kemarin (2/6).

Salah satu PG terbaru yang memulai giling adalah PG Glenmore di Banyuwangi. Pabrik dengan kapasitas giling terpasang 6.500 ton *cane per day* (TCD) itu sudah mulai mengolah tebu. General Manager PG Glenmore Sugondo mengatakan, proses ter-

sebut direncanakan bisa berjalan sebanyak 140 hari.

Target rendemen yang dicanangkan manajemen sebesar 7,5 persen sehingga target gula produksi tercapai sebesar 70 ribu ton. "Kami harap produksi nanti mampu berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan gula konsumsi masyarakat. Sehingga stabilitas harga gula bisa terjaga," katanya.

Direktur Utama SGN Aris Toharisman mengatakan, SGN pada 2024 memasang

target menggiling tebu sebesar 13,5 juta ton. Dari sana, pihaknya memperkirakan produksi gula kristal putih (GKP) mencapai 978 ribu ton dengan kualitas SNI.

Tahun lalu, *subholding* PT-PN III itu akhirnya mengelola 36 pabrik gula. Walaupun mengalami penurunan jumlah tebu digiling sebagai akibat efek El Nino, rendemen yang dicapai naik menjadi 7,19 persen. Angka itu meningkat 111,6 persen dibandingkan 2022. (bil/c17/dio)

Title	Permintaan Domba Wonogiri Melejit	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Jawa Pos	
Page	6	
Author	Al/adi/dri	



KETIBAN BERKAH: Peternak domba di Desa Kerjo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, yang kebanjiran pesanan menjelang Idul Adha.

IWAN ADI LUKUNG/JAWA POS RADAR SOLO

Permintaan Domba Wonogiri Melejit

WONOGIRI – Penjualan domba di Wonogiri menjelang Idul Adha meningkat drastis. Permintaan naik berkali-kali lipat.

Wisnu Tri Pranoto, peternak domba di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo,

mengungkapkan, pesanan datang dari Jogjakarta hingga daerah lain di sekitar Kota Sukses. Permintaan dari Jakarta bahkan sudah meningkat dua bulan lalu.

Di luar Idul Adha, dalam sebulan, Wisnu bisa menjual

sekitar 100 ekor domba. Permintaan itu biasanya dibutuhkan untuk pembibitan. Saat mendekati Hari Raya Kurban ini, pesanan seluruhnya untuk hewan kurban.

"Sudah ada pesanan 720-an ekor. Nanti tinggal meng-

antar pada H-1 (Idul Adha, Red). Ada juga yang akan diambil di kandang," ungkap Wisnu kepada *Jawa Pos Radar Solo* kemarin (2/6).

Selain permintaan yang naik, harga domba untuk kurban juga melonjak. Bahkan, kena-

ikan harga mencapai dua kali lipat. "Biasanya, sebelum Idul Adha Rp 55 ribu–Rp 60 ribu per kilogram. Sampai Idul Adha nanti, harga bisa Rp 100 ribu per kilogram. Itu per kilogram dalam kondisi hidup," katanya. (al/adi/dri)

Title	Impor Beras Masih Meningkat	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Koran Kontan	
Page	15	
Author	Robert	

Impor Beras Masih Meningkat

Negeri ini belum merdeka soal pangan. Indonesia dibayangi impor. Bahkan tahun ini Indonesia bisa lebih tinggi lagi mengimpor beras dari berbagai negara.

Pasalnya, ada penurunan produksi beras tahun ini. Volume produksi Januari-Juli tahun ini dikurangi produksi periode yang sama dibandingkan tahun lalu itu surplus produksinya lebih rendah 2,6 juta ton.

Saat ini, kondisi perberasan dihadapkan tantangan berat. Salah satunya dampak El Nino tahun lalu. Jadi, sepertinya produksi tahun ini kalau bisa dijaga di level tahun lalu sudah sangat bagus, tapi sepertinya produksi tidak sebesar tahun lalu atau lebih rendah.

Tahun ini Perum Bulog berencana mengimpor beras 3,6 juta ton. Impor ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga beras.

Kini di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, ternyata impor masih saja menjadi jalan keluar, yang tentu saja sangat instan. Kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia bertolak belakang dengan janji-janji pemerintah untuk menghentikan impor.

Robert,

Mahakam Raya, Jakarta Selatan

Title	Produksi Padi Turun Lagi, Impor Berpotensi Menanjak	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Koran Kontan	
Page	14	
Author	Lailatul Anisah	

■ PANGAN

Produksi Padi Turun Lagi, Impor Berpotensi Menanjak

JAKARTA. Penurunan produksi beras pada tahun ini berpotensi mengerek volume impor beras. Sementara Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali memperpanjang relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium dan medium.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyoroti penurunan produksi beras pada tahun ini. Bahkan, menurut dia, penurunan produksi tersebut bisa berdampak pada penambahan volume

impor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

"Kenapa? Karena kalau dilihat menggunakan KSA BPS (Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik), produksi Januari-Juli tahun ini dikurangi produksi periode yang sama dibandingkan tahun lalu itu surplus produksinya lebih rendah 2,6 juta ton," jelas Khudori, Jum'at (31/5) pekan lalu.

Saat ini kondisi perberasan menghadapi tantangan yang tidak mudah, salah satunya dampak dari perubahan iklim, terutama fenomena El-Nino

pada tahun lalu. Pada 2024, Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog, Mokhammad Suyanto menyatakan hingga akhir Mei 2024, realisasi impor beras telah mencapai 1,9 juta ton. "Sebanyak 1,9 juta ton yang sudah terealisasi, terdapat pula sekitar 100.000 ton beras impor yang masih dalam perjalanan ke Indonesia," jelas dia.

Di sisi lain, harga beras masih belum mereda dan masih

bertengger di atas harga eceran tertinggi (HET). Bapanas pun kembali memperpanjang relaksasi HET beras premium dan medium.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi bilang, perpanjangan relaksasi HET merupakan bagian dari upaya pemerintah mengatasi tantangan pasokan dan harga pangan di tengah fluktuasi harga komoditas global dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan nasional.

"Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan fleksibili-

tas kepada pelaku usaha, petani, sekaligus memberikan jaminan kepada konsumen untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau," ucap dia dalam keterangannya, Minggu (2/6).

Untuk wilayah Jawa, Lampung dan Sumatra Selatan; HET beras premium yang sebelumnya Rp 13.900 per kg menjadi Rp 14.900 per kg; sedangkan beras medium yang sebelumnya Rp 10.900 per kg menjadi Rp 12.500 per kg.

Lailatul Anisah

Title	Bapanas Kembali Perpanjang Relaksasi HET Beras	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Tribun Medan	
Page	3	
Author	Kontan.co.id	

Bapanas Kembali Perpanjang Relaksasi HET Beras

JAKARTA, TRIBUN - Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali memperpanjang relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium dan medium. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Stakeholder perberasan Nomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa perpanjangan relaksasi beras akan berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) tentang Perubahan atas Perbadan No 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi bilang perpanjangan relaksasi HET ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan pasokan dan harga pangan di tengah fluktuasi harga komoditas global dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan nasional.

"Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha, petani, sekaligus memberikan

jaminan kepada konsumen untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau," katanya dalam keterangannya, Minggu (2/6).

Dalam pelaksanaan relaksasi HET Beras, Bapanas bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan asosiasi pedagang beras.

Hal ini dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan dan pemantauan akan diperkuat untuk mencegah praktik penimbunan dan spekulasi yang dapat merugikan masyarakat. "Dengan kerja sama yang baik, kita dapat memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi seluruh masyarakat Indonesia," urainya.

Adapun besaran relaksasi HET beras sesuai wilayah secara rinci sebagai berikut: untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan; HET beras premium yang sebelumnya seharga Rp13.900/kg menjadi Rp14.900/kg; sedangkan untuk beras me-

dium yang sebelumnya seharga Rp10.900/kg menjadi 12.500/kg.

Untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bangka Belitung ; HET beras premium yang sebelumnya seharga Rp14.400/kg menjadi Rp15.400/kg; sedangkan untuk beras medium yang semula berharga Rp11.500/kg menjadi Rp13.100/kg. Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi; HET beras premium yang mulanya seharga Rp13.900/kg menjadi 14.900/kg; sedangkan untuk beras medium, mulanya seharga Rp10.900/kg menjadi Rp12.500/kg.

Kemudian wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan; HET beras premium yang mulanya seharga Rp14.400/kg menjadi Rp15.400/kg; dan beras medium yang sebelumnya Rp11.500/kg menjadi Rp13.100/kg. Serta wilayah Maluku dan Papua; HET beras premium yang berawal Rp14.800/kg menjadi Rp15.800/kg, dan beras premium yang sebelumnya Rp11.800/kg menjadi Rp13.500/kg. (kontan.co.id)

Title	Berantas Rentenir dengan Sistem Kolaborasi	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Fajar Makassar	
Page	4	
Author	Saenal Masri & Ridwan Marzuki	

Berantas Rentenir dengan Sistem Kolaborasi

REPORTER **SAENAL MASRI**
EDITOR **RIDWAN MARZUKI**

MAKASSAR, FAJAR — Rentenir masih ada. Kolaborasi lembaga keuangan bisa jadi alternatif membendungkannya.

KANTOR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar bersinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia (BI), kementerian/lembaga, dan lembaga jasa keuangan serta seluruh *stakeholder* terkait demi mendorong literasi keuangan. OJK merancang berbagai program dalam rangka menopang perekonomian daerah. Antara lain Klasterisasi UMKM. Pro-

gram ini diluncurkan untuk menjembatani ketimpangan antara *share kredit* terhadap potensi unggulan daerah.

Sekaligus mempertemukan UMKM dengan perusahaan *off taker* yang bertindak sebagai *standby buyer*, sehingga produk dapat terserap dengan harga pasar. Dengan sistem klaster, asesmen, dan administrasi bisa dilakukan sekaligus da-

lam satu rombongan, bank tidak perlu mencari dan berhadapan dengan nasabah secara individu, tetapi melalui kelompok.

"Sehingga, setelah dana kredit dicairkan, pengawasan usaha dan ketertiban pengembalian kewajiban/angsuran bisa diserahkan kepada kelompok," kata Kepala OJK Sulselbar, Darwisman, kemarin.

"(Ini) menggunakan pembayaran satu pintu, skema tanggung renteng, maupun skema *waterfall* dengan melibatkan *off taker*, sehingga risiko bagi bank termitigasi, dan juga terdiversifikasi melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) maupun Asuransi Usa-

ha Tani Sapi (AUTS). Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan *creditworthiness* UMKM," sambungnya.

Melalui sistem klaster, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dapat memberantas rentenir dengan mengurangi hambatan akses kredit perbankan pada sisi *supply*. Sekaligus memberantas praktik ijon yang merugikan petani melalui *off taker* pada sisi *demand*.

"Saat ini, sudah terbentuk 1.031 klaster dengan total plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp581,33 miliar bagi 16.104 UMKM," tuturnya.

Program selanjutnya, Program Hapus Ikatan Rentenir di

Sulawesi (Phinisi), dalam rangka memberantas praktik ijon/rentenir/tengkulak yang marak terjadi di kalangan UMKM, petani, dan nelayan. Program ini menggandeng BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI, dan Bank Sulselbar.

Mereka menyingkronisasikan produk baru maupun existing yang berbiaya rendah, proses pencairan cepat, maupun keduanya.

"Rentenir yang banyak menyasar pedagang pasar, nelayan, petani yang diijon, dicounter dengan keberadaan bank yang fokus pada UMKM. Dilakukan jemput bola ke pasar dan tempat lain secara harian, dengan memanfaatkan jaringan

kantor yang tersebar di setiap daerah," ucap Darwisman.

Dengan jaringan layanan yang lebih luas, kapasitas penyediaan dana yang lebih besar, proses kredit yang lebih mudah dan cepat, serta dengan biaya yang rendah diharapkan dapat menghilangkan ketergantungan para UMKM kepada rentenir. Muaranya, diharapkan makin banyak masyarakat, pedagang, nelayan, petani, maupun kelompok/klaster UMKM yang mendapatkan akses keuangan formal.

"Adapun realisasi program Phinisi tahun ini telah mencapai 54.810 rekening dengan akumulasi plafon sebesar Rp86,57 triliun," terangnya. (*)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Title	Bupati Dan Dandim Tuban Serahkan Bantuan Alsintan dari Kementan RI	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Harian Bhirawa	
Page	8	
Author	Bud.cung	

Bupati Dan Dandim Tuban Serahkan Bantuan Alsintan dari Kementan RI

Tuban, Bhirawa

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., bersama Dandim 0811/Tuban, Letkol Inf Dicky Purwanto menyerahkan 40 unit traktor roda 4 dan 15 pompa air ukuran 4 inci kepada Kelompok Petani (Poktan) dari 20 kecamatan di Kabupaten Tuban, Jumat (31/6).

Bertempat di Pendapa Kridha Manunggal, penyerahan alat mesin pertanian (Alsintan) ini dihadiri pula Sekda Kabupaten Tuban, Budi Wiyana, Kepala DKP2P Tuban, Eko Julianto, Camat dan Danramil, serta penyuluh pertanian.

Pada kesempatan itu Bupati Tuban, mengungkapkan penyerahan alsintan kepada Poktan dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi pertanian. Selain itu, mampu meningkatkan nilai tambah petani dengan menekan biaya operasional.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga

dan mendorong hasil pertanian di tengah kondisi penurunan lahan pertanian nasional dan ancaman perubahan iklim.

"Saat ini produktivitas pertanian padi di Kabupaten Tuban masuk dalam 5 besar tertinggi," ungkapnya.

Lebih lanjut, capaian produktivitas pertanian menjadi kerja bersama petani, penyuluh pertanian, Kodim 0811/Tuban dan Pemkab Tuban. Kebersamaan yang terjalin erat dibarengi dengan sinkronisasi program mampu membawa yang lebih besar bagi masyarakat. Termasuk peningkatan kesejahteraan petani.

Bupati Lindra mengatakan, petani menjadi sosok pahlawan terhadap ketahanan pangan. Kendati demikian, keberhasilan dalam menjaga produktivitas pertanian menjadi tugas semua pihak. Keterseediaan pangan menjadi prioritas di tengah perubahan iklim yang mengancam.

"Karenanya, kolaborasi dan sinergi lintas sektoral sangat diperlukan," sambungnya.

Bupati juga berharap para petani tidak pesimis terhadap pemenuhan target. Target yang ditetapkan harus dipandang sebagai motivasi dan pelecuk bekerja dengan giat dan ikhlas.

Pasca penyerahan alsintan, petani di Kabupaten Tuban mendapatkan target dari Kementan untuk penambahan luas tanam padi hingga 3.800 hektar.

"Harapannya, di tahun 2024 ini Kabupaten Tuban menjadi lumbung pangan nasional," tuturnya.

Sementara itu, Dandim 0811/Tuban, Letkol Inf Dicky Purwanto menyatakan pihaknya siap 100 persen mendukung program pembangunan Pemkab Tuban. Kodim 0811/Tuban selalu siap berkolaborasi dengan Pemkab Tuban dalam mendukung ketahanan pangan. [hud.cung]

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Title	HET Beras Medium Premium Resmi Naik	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Cianjur Ekspres	
Page	1 Part 1	
Author	Jp/sri	



JP

BERAS premium yang dijual pedagang di pasar tradisional.

HET Beras Medium dan Premium Resmi Naik

PEMERINTAH melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) kembali memperpanjang relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium.

■ bersambung ke halaman 2

Title	HET Beras Medium Premium Resmi Naik	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Cianjur Ekspres	
Page	1 Part 2	
Author	Jp/sri	

HET Beras Medium...

dari halaman 1

Dengan begitu, HET beras premium di Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan resmi naik menjadi Rp 14.900 per kilogram (kg), dari sebelumnya Rp 13.900 per kg.

Sedangkan HET beras medium di Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan naik menjadi Rp 12.500 per kg dari sebelumnya Rp 10.900 per kg.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi memastikan penyesuaian harga beras ini sebagaimana tertuang dalam surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada stakeholder perberasan Nomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024.

Ia juga menyampaikan, perpanjangan Relaksasi HET Beras Premium dan Beras Medium berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.

“Perpanjangan relaksasi HET beras ini diberlakukan pada hari ini sampai regulasi baru terkait HET dalam bentuk Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) sebagai perubahan Perbadan 7 tahun 2023 terbit,” ujar Arief dalam keterangannya, Minggu (2/6).

Lebih lanjut, Arief menyebut kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga beras di pasar tradi-

sional serta retail modern di seluruh Indonesia.

Menurutnya, perpanjangan relaksasi HET ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan pasokan dan harga pangan di tengah fluktuasi harga komoditas global dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan nasional.

“Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha dan petani, sekaligus memberikan jaminan kepada konsumen untuk mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan kebijakan relaksasi HET tersebut, NFA bekerja sama dengan

berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan asosiasi pedagang beras, untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Selain itu, pengawasan dan pemantauan akan diperkuat untuk mencegah praktik penimbunan dan spekulasi yang dapat merugikan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh pihak, baik pelaku usaha, petani, maupun konsumen, untuk bersama-sama mendukung kebijakan ini. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Arief Prasetyo Adi. **(jp/sri)**

Title	Hilirisasi Sawit di Papua Jadi Percontohan	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Kaltim Post	
Page	9 Part 1	
Author	Ndu/k15	

Hilirisasi Sawit di Papua Jadi Percontohan



Andi Amran S

MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan Kabupaten Manokwari di Papua Barat mampu menjadi contoh terbaik dalam pengembangan hilirisasi kelapa sawit. Terutama

dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dan pasar ekspor. Menurutnya, Papua adalah daerah strategis karena memiliki lahan yang sangat besar.

"Kalau mau hilirisasi, harusnya lahan yang disiapkan 100 sampai 200 ribu hektare. Dan kalau itu yang disiapkan maka kita bisa sampai mengolah minyak goreng. Nah, seperti itulah kita berpikir harus menuju ke sana supaya tidak bergantung pada impor," ujar mentan saat meninjau rencana pabrik kelapa sawit di Kampung Wasegi Indah, Distrik Prafi, Manokwari, akhir pekan lalu.

Baca **HILIRISASI**...Hal 12 ■

Title	Hilirisasi Sawit di Papua Jadi Percontohan	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Kaltim Post	
Page	9 Part 2	
Author	Ndu/k15	

HILIRISASI

Sambungan dari hal 9

Dengan hilirisasi, Indonesia tak perlu lagi bergantung pada harga sawit dunia karena nantinya bisa melakukan produksi sampai hilirisasi dari dalam negeri. Sementara, produk olahan yang dibuat dapat dipasarkan melalui berbagai market domestik. "Sehingga, bagi kita kalau minyak sawit dunia turun tentu tidak akan ada masalah karena kita bisa jadikan produk olahan ini dipasarkan di dalam negeri," katanya.

Yang terpenting, menurut mentan, baik pemerintah daerah maupun petani sama-sama menjaga perkebunan sawit agar terus berproduksi. Jangan sampai, sawit yang sudah usang dibiarkan tumbuh tanpa ada perawatan atau penggantian. "Dan kami sudah beri bantuan *replanting* untuk 2.300 hektare. Kalau masih ada kita tambah dan itu kendali PSR (peremajaan sawit rakyat) ada di tangan kita," jelasnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, mentan berharap Papua

dapat berkembang sehingga masuk pada kategori mandiri pangan baik dari sisi perkebunan kelapa sawit maupun produksi pangan lainnya. "Yang terpenting adalah bagaimana Papua Barat ini betul-betul mandiri pangan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Bahkan kalau bisa menyuplai ke provinsi tetangga di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Induk," jelasnya.

Dia juga meminta para petani untuk memaksimalkan pemompaan dan jalannya optimasi lahan (Oplah) melalui penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) yang mampu menghemat biaya produksi hingga 50 persen. "Yang mau oplah jangan dialih fungsikan, fokus dengan apa yang telah kita targetkan bersama, yaitu menjadikan Papua sebagai lumbung pangan Indonesia Timur," ujar Amran.

Mengenai hal ini, mentan meminta pemerintah daerah segera mendatangkan alat berat seperti ekskavator maupun mesin perata tanah sehingga dapat diolah menjadi lahan yang produktif. Sementara untuk biayanya,

mentan memastikan pihaknya akan mendukung untuk semua kebutuhannya.

"Segera cari ekskavator karena nanti biayanya akan kita siapkan. Yang kedua dari 20 ribu hektare lahan yang ada saya minta segera dilakukan penambahan melalui cetak sawah," katanya. Berdasarkan data yang ada, Papua Barat memiliki potensi besar dalam mendukung Indonesia lumbung pangan dunia. Salah satunya potensi yang ada di Manokwari yang mencapai 2.558 hektare di Kecamatan Sidey dan Masni.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menambahkan, bahwa kegiatan optimasi lahan sudah berjalan dengan baik seiring kegiatan pemerintah yang terus melakukan perbaikan infrastruktur dan mengalokasikan alsintan dan pemompaan.

"Saat ini telah dilakukan olah tanah dengan menggunakan alsintan yang telah kita alokasikan. Kegiatannya di antaranya normalisasi saluran dan pengolahan lahan pada lahan rawa pasang surut dengan menggunakan TR 4," jelasnya. (ndu/k15)

Title	Optimalkan Luas Tanam Padi Kementan RI Berikan Bantuan Alsintan Melalui Kodim	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Harian Bhirawa	
Page	10	
Author	Hub.bb	

Optimalkan Luas Tanam Padi, Kementan RI Berikan Bantuan Alsintan Melalui Kodim

Tuban, Bhirawa

Badan Pusat Statistik merilis data luas panen padi nasional mengalami penurunan sebesar 0,24 hektar atau 2,29 persen dari yang semula 10,45 juta hektar tahun 2022 menjadi 10,21 juta hektar di tahun 2023.

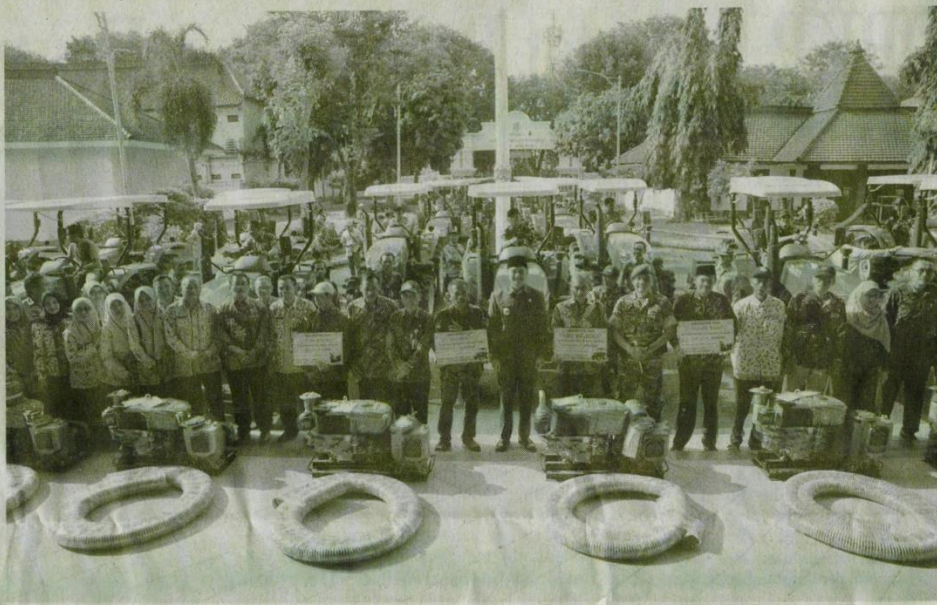
Selain itu, produksi padi nasional juga turun sebesar 0,77 juta ton atau 1,40 persen dari 54,75 juta ton gabah kering giling (GKG) pada tahun 2022 menjadi 53,98 juta ton GKG di tahun 2023.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Tuban, Eko Julianto menyatakan penurunan tersebut juga terjadi pada sektor pertanian padi di Kabupaten Tuban. Produksi padi di Kabupaten Tuban mengalami penurunan sebesar 20.745 ton atau 3,14 persen dari 661.292 ton GKG pada tahun 2022 menjadi 640.547 ton GKG di tahun 2023.

"Adapun penyebabnya adalah fenomena el nino yang mengakibatkan waktu tanam padi mengalami keterlambatan," jelasnya. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah pusat akan mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan kembali luas tanam padi melalui upaya khusus percepatan dan peningkatan tanam padi. Langkah tersebut diambil sebagai upaya menuju swasembada pangan nasional.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, lanjut Eko Julianto, Pemkab Tuban berupaya melakukan optimalisasi lahan tadah hujan dan menaikkan Indeks Pertanaman (IP) 1 menjadi IP 2 bahkan IP 3. Artinya, lahan yang semula hanya bisa tanam sekali dalam setahun akan diupayakan dapat ditanami 2-3 kali dalam setahun.

Guna mencapai tujuan tersebut, dilakukan pemanfaatan air permukaan, seperti air, sungai, embung, dan sumber mata air lainnya. Di samping itu, diberikan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) berupa pompa air dan traktor untuk mempercepat dan menambah luas tanam padi di lahan yang sekali tanam.



Penyerahan alsintan dilaksanakan di Pendopo Krido Manunggal sebanyak 40 unit traktor dan 15 unit pompa air ukuran 4 dim.

Eko Julianto menyebutkan Kementerian Pertanian RI memberikan sejumlah alsintan kepada Pemkab Tuban untuk selanjutnya disalurkan kepada petani.

Adapun bantuan yang disalurkan Kementerian RI melalui Pemkab Tuban antara lain traktor roda 4 sebanyak 40 unit, traktor roda 2 sebanyak 15 unit, pompa air sebanyak 85 unit (ukuran 3 dim 61 unit, ukuran 4 dim 18 unit dan ukuran 6 dim 6 unit).

Selain itu, juga mendapat tambahan pompa air ukuran 3 dim alokasi untuk Bri-

gade TNI di Kodim 0811/Tuban sebanyak 90 unit. "Adapun target dari Kementerian untuk penambahan luas tambah tanam padi di Kabupaten Tuban mencapai 3.800 hektar," jelasnya.

Eko Julianto menambahkan proses penyaluran bantuan alsintan tersebut terbagi dalam 4 tahap. Tahap pertama, dilaksanakan pada 30 April di Markas Kodim 0811/Tuban sebanyak 27 unit pompa air. Tahap kedua dilaksanakan pada 14 Mei di Makodim 0811/Tuban sebanyak 36 unit

pompa air. Tahap ketiga, dilaksanakan pada 27 Mei di Makodim sebanyak 90 unit pompa air. Tahap keempat, dilaksanakan 31 Mei di Pendopo Krido Manunggal sebanyak 40 unit traktor dan 15 unit pompa air ukuran 4 dim.

"Proses pendistribusian, penggunaan, dan pelaporan pencapaian target bantuan alsintan dilaksanakan bersama antara penyuluh DKP2P dan TNI yang ditujukan kepada Kementerian RI dan Mabes TNI," tandasnya. [hud.bb]

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Tittle	Pacu Produksi Perlu Saluran Air Bawah Tanah	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Duta Masyarakat	
Page	5	
Author	Imm/dah	

Pacu Produksi Perlu Saluran Air Bawah Tanah

Panen Raya Padi di Desa Pendem

BATU -Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, bersama Forkompinda dan anggota Kelompok Tani, melakukan panen raya padi di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Sabtu (1/6/2024).

Dalam kesempatan ini Pj. Wali Kota Batu mengaku sangat bersyukur atas keberhasilan kelompok tani di Desa Pendem, hingga bisa melakukan panen raya di lahan seluas 32 hektar.

Desa pendem sendiri saat ini mempunyai luasan potensial padi sekira 250 hektar tetapi dalam satu tahun hanya bisa melakukan 1 kali sampai 2 kali panen, akibat kekurangan suplai air. Padahal sebenarnya bisa panen hingga 3 atau 4 kali setahun.

Petani berharap kedepannya bisa mendapatkan bantuan swadaya berupa pemasangan saluran air bawah tanah untuk mengaliri sawah, supaya potensi luasan padi di desanya bisa dimaksimalkan hingga 400-600 hektar. Sedangkan,

produktivitas padinya selama setahun sebesar 6.21%.

"Struktur sarana pertanian harus segera dilengkapi, karena mereka adalah pahlawan kita di bidang pangan. Agar kita segera komunikasikan dengan pemerintah pusat dan TNI, mungkin ada inovasi yang bermanfaat di bidang pertanian. Saya lihat banyak sekali alat yang bisa dimanfaatkan oleh petani," kata Aries.

Dalam kegiatan panen raya ini, Aries juga menyampaikan bahwa pembangunan di sektor pertanian Kota Batu semakin membaik berkat partisipasi masyarakat, kelompok tani, pihak desa, bahkan TNI dan Polri yang bersama-sama memajukan pertanian di Kota Batu.

Aries berharap keberhasilan Desa Pendem dalam mengelola lahan pertanian, bisa menjadi wilayah unggulan dan menjadi andalan di sektor pertanian tanaman pangan di Kota Batu.

Diharapkan pula, dengan berbagai terobosan, nantinya tidak hanya komoditi padi saja. Namun juga tanaman lainnya, seperti sayur



Penan Raya, Pj. Wali Kota Batu Aries Agung Paewai (tengah) bersama Forkompinda panen raya di Kecamatan Junrejo Batu.

mayur yang telah menjadi unggulan, mampu meningkatkan daya saing wilayah Kota Batu dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera.

Sementara itu, Dandim 0818 Letkol Infanteri Yudo, yang di daulat memberikan sambutan, dalam arahannya menyampaikan bahwa sebagai

sinergitas kebijakan, telah dibangun kolaborasi antara TNI AD dengan Kementerian Pertanian. Terutama dalam membantu para petani dalam mengatasi berbagai kendala peningkatan produksi padi.

Sebagai tindak lanjut sinergitas kebijakan tersebut, Dandim

menyampaikan bahwa di wilayah teritorial Kodim 0818 Malang - Batu, telah dilaksanakan berbagai program untuk membantu petani padi. Diantaranya seperti diadakan program pompanisasi untuk mengatasi kendala air irigasi pertanian. • Imm/dah

Titlle	Penjual Harus Tunjukkan Surat Hasil Vaksinasi	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Koran Gala	
Page	5	
Author	Eki Triana	

Penjual Harus Tunjukkan Surat Hasil Vaksinasi

NGAMPRAH, (KG).-

Dinas Perikanan dan Peternakan (Dispernakan) Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah mengeluarkan persyaratan ketat untuk mencegah adanya penyakit menular dari hewan ternak untuk lebaran kurban.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) Dispernakan KBB, Acep Ruhimat mengatakan, sapi untuk hewan kurban biasanya umumnya dari daerah luar daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena itu sejumlah langkah pun dilakukan agar hewan kurban tersebut menularkan penyakit hewan.

“Ternak harus sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), bebas penyakit PMK dan LSD yang dilengkapi bukti hasil laboratorium serta riwayat vaksinasi,” katanya kepada wartawan, belum lama ini.

Acep menjelaskan, bagi peternak atau penjual sapi di KBB yang membeli hewan ternak dari luar daerah setidaknya harus menunjukkan surat hasil vaksinasi.

“Maka dari itu, bagi yang tidak bisa menunjukkan kami tidak akan memberikan masuk ke wilayah Kabupaten Bandung Barat,” kata dia.

Menurut Acep pengetatan pengawasan lalu lintas ternak bertujuan untuk mencegah penularan penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah lainnya yang dapat mengancam kesehatan hewan dan manusia.

Langkah tersebut juga dilakukan guna melindungi wilayah KBB dari risiko penularan penyakit hewan strategis, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan.

“Status penyakit di kabupaten/kota berpedoman kepada Kepmentan 311 Tahun 2023 tentang Status Penyakit di Suatu Wilayah,” ujar dia.

Pemeriksaan

Acep menegaskan, Dispernakan KBB telah mempersiapkan rencana pemeriksaan hewan kurban tahun 2024. Pemeriksaan akan dimulai dari tanggal 1 sampai 21 Juni 2024

“Kemudian untuk post mortem atau pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih dijadwalkan dari tanggal 17 sampai 21 Juni 2024,” ujarnya.

Nantinya pemeriksaan akan melibatkan 45 orang petugas, terdiri dari 11 dokter hewan, 11 PPL dan 20 orang paramedis. Acep mengatakan, pihaknya juga akan menyiapkan label sehat sebanyak 10.000, 40 buku SKKH, dan 100 stiker lapak.

Lebih lanjut Acep mengungkapkan 50 persen hewan kurban yang ada di wilayahnya berasal dari luar daerah. Selain didatangkan langsung dari luar, hewan kurban tersebut juga ada yang dibesarkan di Kabupaten Bandung Barat.

“Setengah hewan kurban yang diperdagangkan di Kabupaten Bandung Barat memang berasal dari luar daerah. Tapi seperti sapi potong kebanyakan pembesarannya di KBB, yang memang sengaja setelah besar dijual untuk hewan kurban,” pungkasnya. **(Eki Triana)****

Title	Pemkot Tak Lagi Lakukan Penyekatan Hewan Kurban	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Jawaposidoarjo	
Page	17	
Author	Dho/c6/ai	

Pemkot Tak Lagi Lakukan Penyekatan Hewan Kurban

SURABAYA – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya mulai mendata pedagang hewan kurban. Puluhan pengajuan izin untuk keperluan Idul Adha telah masuk dan belum semuanya disetujui. Hal tersebut disebabkan adanya pedoman dan syarat ketat yang harus dipenuhi oleh para pedagang.

Kabid Peternakan DKPP Surabaya drh Sunarno Aristono mengungkapkan, pihaknya sudah menerima 88 pengajuan di berbagai wilayah sampai Rabu (29/5) sore. Mulai dari Kecamatan Jambangan, Karangpilang, hingga Wonocolo. Menurut dia, jumlah pengajuan itu sangat mungkin terus bertambah mendekati Idul Adha. "Saat ini, yang sudah disetujui ada 43 orang dan 45 orang masih menunggu verifikasi," papar



CEK KESEHATAN: Petugas memeriksa hewan kurban. Tahun ini pemkot tak lagi melakukan penyekatan karena mayoritas hewan sudah divaksin PMK.

dia kemarin (30/5).

Mayoritas pengajuan berasal dari pedagang ternak dari luar Surabaya. Yakni, Lamongan, Malang, Pasuruan, Probolinggo, serta yang paling banyak dari Madura. Ada beberapa syarat yang harus mereka penuhi seperti administrasi. Ternak yang dijual harus sudah

mendapatkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku setidaknya satu kali. Salah satu syarat wajib lainnya adalah perizinan dari kecamatan setempat. "Untuk mengontrol arus lalu lintas hewan serta memastikan aspek lingkungan seperti kebersihan, polusi, dan kepemilikan lahan

Banyak hewan ternak yang sudah mendapatkan vaksin meski berasal dari daerah lain. Masyarakat tidak usah khawatir."



drh SUNARNO ARISTONO
Kabid Peternakan DKPP
Surabaya

agar tidak menimbulkan masalah," katanya.

Tidak ada perubahan syarat dibandingkan Idul Adha tahun lalu. Hanya, proses pengajuan tidak lagi menggunakan aplikasi SSW Alfa. Namun, langsung

terpusat secara nasional menggunakan aplikasi dari Kementerian Pertanian. Aristono menerangkan, pihaknya tidak lagi melakukan penyekatan di perbatasan mengingat prevalensi wabah PMK sudah tidak ditemukan. "Banyak hewan ternak yang sudah mendapatkan vaksin meski berasal dari daerah lain. Masyarakat tidak usah khawatir," tegasnya.

Pada hari H, pihaknya akan melakukan pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* di seluruh wilayah. Hal tersebut merupakan pemeriksaan dini sebelum diedarkan kepada masyarakat. Sekaligus menegaskan bahwa hewan tidak mengandung penyakit dan dalam keadaan sehat. Tentunya, aman dikonsumsi sekaligus tak ada cacat fisik. **(dho/c6/ai)**

Title	Ditargetkan Papua Barat Jadi Kawasan Hilirisasi Sawit	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	10	
Author	Gro	

Ditargetkan Papua Barat Jadi Kawasan Hilirisasi Sawit

NERACA

Manokwari - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat mampu menjadi contoh terbaik dalam pengembangan hilirisasi kelapa sawit terutama dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dan pasar ekspor. Menurut Mentan, Papua adalah daerah strategis karena memiliki lahan yang sangat besar.

"Kalau mau hilirisasi harusnya lahan yang disiapkan 100 sampai 200 ribu

hektare. Dan kalau itu yang disiapkan maka kita bisa sampai mengolah minyak goreng. Nah seperti itulah kita berpikir harus menuju ke sana supaya tidak bergantung pada impor," ujar Amran saat meninjau rencana pabrik kelapa sawit di Kampung Wasegi Indah, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari.

Dengan hilirisasi, kata Mentan, Indonesia tak perlu lagi bergantung pada harga sawit dunia karena nantinya bisa melakukan produksi sampai hilirisasi dari dalam negeri. Sementara produk olahan yang

dibuat dapat dipasarkan melalui berbagai market domestik. "Sehingga bagi kita kalau minyak sawit dunia turun tentu tidak akan ada masalah karena kita bisa jadikan produk olahan ini dipasarkan di dalam negeri," kata Amran.

Hal yang terpenting, menurut Amran, baik pemerintah daerah maupun petani sama-sama menjaga perkebunan sawit agar terus berproduksi. Jangan sampai, sawit yang sudah usang dibiarkan tumbuh tanpa ada perawatan atau penggantian. ● gro

Title	Hari Susu Nusantara dan Program Pembagian Susu Gratis
Date	3 Juni 2024
Media	Neraca
Page	2
Author	Teguh Boediyana



Kementerian Pertanian

Hari Susu Nusantara dan Program Pembagian Susu Gratis

Oleh : Teguh Boediyana, Ketua Dewan Persusuan Nasional

Memperingati Hari Susu Nusantara tanggal 1 Juni 2024, tidaklah salah dan berlebihan kalau ada pihak yang memberikan penilaian bahwa usaha peternakan sapi perah rakyat di Negara kita saat ini dalam keadaan darurat atau lebih ekstrem lampu merah. Tentunya penilaian itu ada dasarnya. Kita lihat sekilas bagaimana kondisi peternakan sapi perah rakyat yang ada di Negara kita yang sebenarnya merupakan penghasil "emas putih".

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian cq. Ditjen Peternakan dan PKH, produksi susu segar sebagai hasil usaha peternakan sapi perah dalam negeri hanya mampu memasok dibawah 20 persen dari kebutuhan nasional. Ini berarti bahwa untuk memenuhi konsumsi susu yang nota bene per kapita masih rendah yakni sekitar 16 liter/kapita /tahun, kita masih impor. Indikator lain adalah bahwa populasi sapi perah rakyat sangat stagnan dalam kurun waktu dua dekade.

Pada saat ini produksi susu segar dalam negeri di bawah 1 (satu) juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan sudah mencapai sekitar 4,5 juta Ton setara susu segar. Indikator kedua, data dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) jumlah koperasi susu primer yang menjadi wadah dari peternak sapi perah jumlahnya

menyusut dari waktu ke waktu. Saat ini jumlah koperasi susu primer 55 unit. Bandingkan sepuluh tahun yang lalu berjumlah 95 buah yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Ketiga produksi susu segar yang dihasilkan peternakan sapi perah rakyat lebih dari 20 tahun dapat dikatakan sangat stagnan. Populasi sapi perah juga tidak menunjukkan pertambahan yang signifikan. Terlebih di tahun 2013 telah terjadi pemotongan sapi perah betina yang sangat tinggi dan di tahun 2022 ribuan sapi perah mati karena Penyakit Mulut dan Kuku.

Peternakan sapi perah rakyat dari tahun ketahun tidak mengalami kemajuan yang berarti. Masalah klasik yang telah berjalan berpuluh tahun adalah bahwa peternakan sapi perah rakyat bertumpu pada peternak rakyat yang memiliki sapi antara 2 - 4 ekor. Masih sangat jauh dari standard ideal minimal memelihara 10 ekor sapi yang laktasi. Masalah kedua biaya produksi susu segar peternak rakyat tidak seimbang dengan harga susu segar yang mereka terima.

Kenaikan harga pakan baik berupa pakan hijauan ataupun pakan konsentrat terus meningkat dan efeknya adalah peternak tidak mampu memberikan pakan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan sapi mereka. Masalah keti-

ga, sampai saat ini pemasaran susu segar yang dihasilkan peternak sapi perah rakyat masih tergantung kepada Industri Pengolahan Susu (IPS) di mana pemasarannya melalui wadah koperasi. Hampir 90 persen susu segar yang dihasilkan dipasarkan ke IPS sebagai bahan baku melalui wadah koperasi. Peternak sapi perah rakyat praktis tidak pernah menikmati nilai tambah dari susu segar yang mereka hasilkan.

Dengan perkataan lain posisi tawar peternak sapi perah terhadap Industri Pengolahan Susu sebagai pasar utama sangat lemah. Masih banyak lagi masalah dan tantangan yang mereka hadapi yang berimbas bahwa usaha peternakan sapi perah rakyat sebagai penghasil susu segar secara nasional tidak berkembang secara signifikan.

Kondisi vs Industri Persusuan

Suatu realita bahwa kondisi peternakan sapi perah rakyat bertolak belakang dengan industri persusuan secara umum. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, saat ini terdapat 84 industri yang berbasis bahan baku susu dengan kapasitas mesin terpasang untuk memproses sekitar 5,5 juta ton susu setara susu segar. Kita bandingkan sebelum reformasi hanya terdapat kurang dari 10 buah pabrik pengolahan susu.

Selain dari pada itu dalam kurun limabelas tahun terakhir beberapa korporasi besar telah melakukan investasi di sector hulu membangun peternakan sapi perah skala besar.

Banyak korporasi yang yakin bahwa industri persusuan memiliki prospek yang cerah selaras dengan semakin tingginya masyarakat kelas menengah dan atas serta semakin meningkatnya masyarakat yang sadar gizi. Iklan yang sangat intens menawarkan produk susu di berbagai mass media dan sarana *advertising* lainnya merupakan manifestasi tumbuh dan cerahnya prospek industri persusuan.

Pada saat bangsa Indonesia memasuki rangkaian Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 - 2029, masyarakat peternak sapi perah rakyat menyambut dengan antusias dan menaruh harapan besar ketika salah satu Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menyampaikan janji politik dalam kampanyenya antara lain akan melaksanakan program pembagian susu gratis. Harapan tersebut semakin membesar ketika ternyata pasangan Capres - Cawapres nomor urut 02 tersebut telah terpilih dan memenangkan konstestasi Pilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2024.

Para peternak sapi perah rakyat sangat yakin bahwa program pembagian susu gratis yang akan dilaksanakan setidaknya tidaknya mulai tahun 2025 yang akan datang akan merupakan stimulan dan gebrakan politik yang akan memacu peternak sapi perah rakyat. Setidaknya tidaknya ada peluang untuk mengembangkan peternakan sapi perah rakyat yang selama ini terseok seok.

Janji Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk merealisasi Program Pembagian Susu Gratis adalah suatu janji dan gebrakan politik yang sangat berani dan strategis. Memang tidak mudah dan tidak murah untuk realisasinya. Tetapi dampak ekonomi dan sosialnya dalam jangka panjang akan sangat besar. Bukan hanya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya generasi muda, tetapi juga akan mendorong percepatan usaha peternakan sapi perah rakyat.

Usaha peternakan sapi perah rakyat akan berkembang secara bertahap sehingga permasalahan klasik yang ada saat ini akan diatasi. Kita yakin dengan perencanaan yang komprehensif maka program pembagian susu gratis akan memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional. Intinya program pembagian susu gratis dikaitkan dengan peternakan sapi perah rakyat.

Title	Juni 2024, PE CPO Sebesar USD778,82/MT	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	11	
Author	Gro	

Juni 2024, PE CPO Sebesar USD778,82/MT

Jakarta - Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPD-PKS), atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE), untuk periode Juni 2024 adalah sebesar USD778,82/MT. Nilai ini menurun sebesar USD98,46 atau 11,22 persen dari periode Mei 2024 yang tercatat sebesar USD 877,28/MT.

■ NERACA

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Budi Santoso mengungkapkan, saat ini, HR CPO mengalami penurunan yang mendekati ambang batas sebesar USD-680/MT.

"Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan Bea Keluar CPO sebesar USD 18/MT dan Pungutan Ekspor CPO sebesar USD 75/MT untuk periode Juni 2024," kata Budi.

Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 662 tahun 2024 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan BLU BPD-PKS Periode Juni 2024.

Penetapan HR CPO bersumber dari rata-rata harga selama periode 25 April 24 Mei 2024 pada Bursa CPO di Indonesia sebesar USD 735,03/MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar USD 822,61-/MT, dan Pasar Lelang CPO Rotterdam sebesar USD 923,53/MT.

Berdasarkan Permen dag Nomor 46 Tahun 2022, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga

sumber harga sebesar lebih dari USD40, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median.

Berdasarkan ketentuan tersebut, HR bersumber dari Bursa CPO di Malaysia dan Bursa CPO di Indonesia. Sesuai dengan perhitungan tersebut ditetapkan HR CPO sebesar USD 778,82/MT.

Selain itu, minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kilogram (kg) dikenakan BK USD 0/MT dengan penetapan merek sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 663 Tahun 2024 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 kg.

BK CPO periode 1 Juni 2024—30 Juni 2024 merujuk pada Kolom Angka 3 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 71 Tahun 2023 sebesar USD18/MT.

Sementara itu, Pu-

ngutan Ekspor CPO periode Juni 2024 merujuk pada Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 jo. 154/PMK.05/2022 sebesar USD75/MT.

Penurunan HR CPO ini dipengaruhi oleh adanya penurunan harga minyak kedelai dan harga minyak mentah dunia, serta peningkatan produksi yang tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan.

Sebelumnya, untuk periode Mei 2024 adalah sebesar USD877,28/MT. Nilai ini meningkat sebesar USD 19,67 atau 2,29 persen dari periode April 2024 yang tercatat sebesar USD 857,62/MT.

"HR CPO mengalami peningkatan yang menjauhi ambang batas sebesar USD-680/MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan Bea Keluar CPO sebesar USD52/MT dan Pungutan Ekspor CPO sebesar USD90/MT untuk periode Mei 2024," kata Budi.

Lebih lanjut, pelaku usaha sawit tetap optimis harga minyak sawit akan lebih baik tahun 2024. Meski di bayangi perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia dan inflasi tinggi yang dialami banyak negara di dunia. "Tahun depan kami optimistis, kinerja industri sawit bakal bullish," ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono.

Eddy mengakui, perlambatan ekonomi dunia sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia yang berimbas harga minyak sawit Indonesia. Belum lagi faktor El Nino dan lambat-

nya peremajaan ikut mempengaruhi kinerja industri.

Namun Eddy mengakui, bahwa sebelumnya produksi minyak sawit Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi. Selain El Nino dan peremajaan perkebunan rakyat juga belum maksimal.

Di sisi lain, Eddy mengatakan, konsumsi domestik terus naik seiring dengan implementasi B35. Untuk itu diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga daya saing industri sawit Indonesia.

"Peran pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang pro industri serta memperjuangkan sawit di forum internasional Uni Eropa akan membantu sawit dalam menghadapi berbagai hambatan ke depan," harap Eddy.

Meski begitu, Eddy berharap pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk menjaga daya saing industri kelapa sawit Indonesia dengan memperkuat produksi minyak sawit berkelanjutan.

Menurut Eddy, sejumlah tantangan harus dihadapi industri sawit nasional di antaranya melembahnya laju ekonomi global dan inflasi yang dialami oleh sepertiga negara di dunia.

Situasi geopolitik dunia seperti perang Russia dan Ukraina serta konflik terkini yang belum lama terjadi, yakni perang Israel dan Palestina, menurut Eddy, industri sawit Indonesia perlu mengambil langkah untuk tetap bertahan dalam ketidakpastian pasar. ●gro

Title	KENAIKAN HARGA BAHAN POKOK	
Date	3 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	10	
Author	Neraca	



NERACA/Antarafoto/Muhammad Bagus Khoirunas/wpa

KENAIKAN HARGA BAHAN POKOK : Calon pembeli memilih bahan kebutuhan pokok di Pasar Rangkasbitung, Lebak, Banten, Sabtu (1/6/2024). Menurut pedagang, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan seperti bawang merah dari sebelumnya Rp30 ribu per kilogram kini menjadi Rp45 ribu per kilogram, cabai merah Rp30 ribu per kilogram menjadi Rp50 ribu per kilogram.

Title	Pemprov Jabar: Sekitar 10.000 Pompa Air untuk Kekeringan Lahan	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

Pemprov Jabar: Sekitar 10.000 Pompa Air untuk Atasi Kekeringan Lahan

NERACA

Garut - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Jawa Barat menyebutkan ada sekitar 10 ribu peralatan pompanisasi air untuk mengatasi lahan pertanian yang dilanda kekeringan saat musim kemarau.

"Tahun sekarang ada bantuan dari pemerintah pusat (Kementerian Pertanian) untuk irigasi perpompaan, syaratnya sumber air permukaan, bukan sumber air dalam," kata Kepala DTPH Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dadan Hidayat usai pertemuan dengan petani organik di Kampung Ciawitali Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, dikutip Antara, kemarin.

Ia menuturkan jajarannya sudah melakukan antisipasi untuk menghadapi dampak musim kemarau tahun ini, salah satunya dengan menyiapkan bantuan peralatan pompa air untuk menarik air dari irigasi atau aliran sungai agar bisa mengairi lahan pertanian.

Ia menyebutkan jenis bantuan dari Kementerian Pertanian itu terdiri atas 10 ribu unit peralatan pompa dan 700 unit untuk irigasi pompanisasi yang siap disalurkan ke pemerintah daerah kota/kabupaten berdasarkan pengajuan.

"Dari Kementerian Pertanian itu 10 ribu unit pompa, dan 700 unit irigasi pompanisasi, ini prioritas semua daerah, kembali kepada usulan pemerintah kabupaten dan kota," katanya.

Ia menyampaikan pengadaan peralatan pompa itu memiliki perbedaan untuk penyalurannya yakni untuk 700 unit pemerintah daerah mengusulkan calon petani dan calon lokasinya, lalu bantuan berupa peralatan pompanisasi bisa diberikan.

Sedangkan yang 10 ribu unit peralatan pompa itu, kata dia, penyalurannya dengan mengirimkan dana dari pemerintah langsung ke rekening kelompok tani untuk dibelikan kebutuhan peralatan pompa airnya.

"Ada juga bantuan dari irigasi perpompaan itu sifatnya transfer, uangnya ke para rekening kelompok tani, nanti petani bisa beli pompanya, bisa beli rumah pompa, bisa beli bak penampungannya," kata Dadan.

Ia menambahkan perkataan itu nanti sebagian akan diberikan untuk Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang bertugas untuk membantu petani meminjamkan peralatan pompanisasi agar lahannya tidak kering. Selain pompanisasi, kata dia, ada juga program bantuan pembuatan sumur bor dangkal untuk memenuhi kebutuhan air pertanian di berbagai daerah, namun bantuan itu sama harus lebih dulu diusulkan dari petani. ● ant

Title	Kementan dan DPK Pandeglang Gelar Panen Buku	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Banten Raya	
Page	7	
Author	Satibi	

Kementan dan DPK Pandeglang Gelar Panen Buku

PANDEGLANG, BANTEN RAYA-Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Biro Humas dan Informasi Publik, membangun minat generasi penerus pada bidang pertanian melalui giat Panen Buku yang diadakan di Taman Baca Masyarakat Al-Latif, Mandalawangi, Pandeglang.

Panen Buku merupakan kegiatan donasi buku dengan maksud mengantarkan minat lewat literasi yang terarah, agar masyarakat dapat memahami sejak dini urgensi serta peran mereka dalam mendukung keberlanjutan pangan di masa depan.

"Sesuai amanah Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Setjen Kementan, kegiatan ini adalah sebagai wahana masyarakat dari usia dini untuk menyadari dan mengembangkan minat pada pertanian, dan pada akhirnya mengembangkan potensi mereka mengarah

pada peningkatan tarafhidup melalui sektor pertanian," kata Ketua Kelompok Pengelolaan Informasi Publik Kementan Wahyu Indarto di Mandalawangi, Pandeglang.

Pada giat Panen Buku tidak hanya dilakukan donasi dan bedah buku dengan tema pertanian saja, namun dilakukan pula praktik menanam komoditas hortikultura yang dipandu oleh penyuluh dari Balai Penerapan Standarisasi Instrumen Banten.

"Panen buku dan praktik bertani di Taman Baca Masyarakat merupakan sarana edukasi. Efek kedepan diharapkan terbentuk ikatan emosional sehingga di fase usia berikutnya anak-anak tidak asing dengan aktivitas pertanian" tambah Wahyu lagi.

Seiring dengan itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Pandeglang Neneng Nuraini menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan. "Hal yang dilakukan oleh Kementan merupakan kegiatan positif dari inklusi sosial dimana terdapat proses yang memungkinkan individu atau anak-anak kita ini berpartisipasi

dalam kehidupan sosial mereka, khususnya dalam dunia pertanian," ujarnya.

Neneng menambahkan giat Panen Buku diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan serta potensi masyarakat, lebih jauhnya masyarakat dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kesehariannya menuju kesejahteraan.

"Semoga dengan adanya bantuan 300 buku ini, dapat menambah ilmu dan wawasan anak-anak di desa Mandalawangi dan meningkatkan minat membaca anak-anak, kemudian mereka mempraktikannya dan kamipun komitmen untuk melakukan pembinaan secara langsung dan berkelanjutan karena mesti ketahui TBM ini," ungkapnya.

"Salah satu TBM yang sangat aktif dan semangat menebarkan literasi dikabupaten Pandeglang terhusunya di kampung cigobang, curuglemo, mandalawangi, terbukti saat ini saya yakin anggota yang ada di sini siap berprestasi siap bersaing menjadi orang-orang yang berkualitas kreatif dan inovatif," sambung Neneng. (satibi)



SALAM LITERASI : Pengurus Taman Bacaan masyarakat Al-Latif, Mandalawangi, Pandeglang foto bersama dengan Humas Kementerian Pertanian usai melaksanakan kegiatan Panen Buku, kemarin.

Title	Masa Tanam Kedua Dipercepat	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Banten Post	
Page	3	
Author	DHE/PBN	

Masa Tanam Kedua Dipercepat



Petani saat menanam padi.

PANDEGLANG, BANPOS - Agar bisa memaksimalkan lahan garapan dan hasil panen padi di Kabupaten Pandeglang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) setempat mulai melakukan percepatan masa tanam kedua.

Kepala DPKP Kabupaten Pandeglang, M Nasir mengatakan, program percepatan masa tanam merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya krisis pangan, sekaligus memaksimalkan

semua lahan garapan pertanian di Kabupaten Pandeglang. Sasaran atau target lahan percepatan tanam padi tersebut lebih dari 128.700 hektare disemai wilayah Kabupaten Pandeglang.

"Harapan kita saat ini bisa mencapai target tanam kita di atas 128.700 hektare tahun ini. Untuk sekarang baru terealisasi lebih dari 17.602 hektare untuk memperkuat ketahanan produksi pangan," kata Nasir kepada wartawan, Minggu (2/6).

Nasir meyakini, percepatan masa tanam bisa membantu meningkatkan pendapatan para petani, karena dalam satu tahun bisa melakukan panen hingga empat kali. Selain itu, lahan yang biasanya panen dua kali dalam satu tahun, ditargetkan bisa sampai tiga kali panen dalam satu tahun.

"Lahan yang kinerja dua kali panen, dibantu dengan pompa air sehingga kinerja produksi bisa tiga kali. Luas baku

lahan sawah kita saat ini 52.640 hektar dengan Indeks Pertanaman (IP) 300 atau tiga kali bahkan ada yang empat kali tanam," terangnya.

Nasir mengatakan, para petani bisa memanfaatkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk meminimalisir kerugian ketika terjadi gagal panen. Sejauh ini, masih banyak petani yang tidak memanfaatkan program tersebut dan tidak mendaftar sebagai anggota atau peserta asuransi.

"Musim tanam ini kita harapkan para petani dapat mengikuti asuransi usaha tani padi agar terhindar dari bencana puso akibat kemarau, banjir, terkena serangan hama dan penyakit, maka ikutilah AUTP," katanya.

"Keuntungan program itu, per hektarnya hanya Rp36.000 asuransi Jasindo. Kalau tanaman kita terserang dan kena bencana akan di ganti kerugian sebesar Rp6 juta per hektare dengan premi Rp36.000 tersebut," ungkapnya.

Terpisah, Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pandeglang, Anton Haerul Samsi menyarankan agar para petani bisa mengikuti program tersebut agar bisa meningkatkan perekonomian dan mencegah terjadinya krisis pangan.

"Iya sebaiknya memang para petani mengikuti program percepatan masa tanam dan asuransi yang sudah ada. Tetapi, dinas terkait juga harus bisa mensosialisasikannya kepada petani secara menyeluruh, agar semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan," katanya. (DHE/PBN)

Tittle	Masa Tanam Kedua Dipercepat	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Satelit News	
Page	11	
Author	Adib/Mardiana	



ISTIMEWA

MENANAM PADI: Sejumlah petani melakukan percepatan musim tanam padi, untuk memaksimalkan lahan garapan dan hasil panennya.

Masa Tanam Kedua Dipercepat

SATELITNEWS, PANDEGLANG - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang, mulai melakukan percepatan masa tanam kedua. Tindakan itu dimaksudkan, agar bisa memaksimalkan lahan garapan dan hasil panen.

Kepala DPKP Kabupaten Pandeglang M. Nasir mengatakan, program percepatan masa tanam merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya krisis pangan, sekaligus memaksimalkan semua lahan garapan pertanian di Kabupaten Pandeglang.

Sasaran atau target lahan percepatan tanam padi itu, lebih dari 128.700 hektare di semua wilayah Kabupaten Pandeglang.

“Harapan kita saat ini dan harapan bisa mencapai target tanam kita di atas 128.700 hektare tahun ini. Untuk sekarang baru terealisasi lebih dari 17.602 hektare untuk memperkuat ketahanan produksi pangan,” kata Nasir, Minggu (2/6).

Nasir meyakini, percepatan masa tanam bisa membantu meningkatkan pendapatan para petani, karena dalam satu tahun bisa melakukan panen hingga empat kali. Selain itu, lahan yang biasanya panen dua kali dalam satu tahun, ditargetkan bisa sampai tiga kali panen dalam satu tahun.

“Lahan yang kinerja dua kali panen, dibantu dengan pompa

air sehingga kinerja produksi bisa tiga kali. Luas baku lahan sawah kita saat ini 52.640 ha dengan Indeks Pertanaman (IP) 300 atau tiga kali bahkan ada yang empat kali tanam,” tambahnya.

Nasir mengatakan, para petani bisa memanfaatkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), untuk meminimalisir kerugian ketika terjadi gagal panen. Sejauh ini, masih banyak petani yang tidak memanfaatkan program tersebut dan tidak mendaftar sebagai anggota atau peserta asuransi.

“Musim tanam ini kita harapkan para petani dapat ikut mengikuti asuransi usaha tani padi agar terhindar dari bencana puso seperti akibat kemarau, banjir, terkena serangan hama dan penyakit, maka ikutilah AUTP,” katanya. “Keuntungan program itu, per hektarnya hanya Rp36.000 asuransi Jasindo. Kalau tanaman kita terserang dan kena bencana akan di ganti kerugian sebesar Rp6 juta per hektare dengan premi Rp36.000 tersebut,” tutupnya.

Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pandeglang Anton Hae-rul Samsi menyarankan, agar para petani bisa mengikuti program tersebut, agar bisa meningkatkan perekonomian dan mencegah terjadinya krisis pangan. **(adib/mardiana)**

Title	Program Sumur Bor untuk Pertanian	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Suara Ntb	
Page	5 Part 1	
Author	Bul	

Program Sumur Bor untuk Pertanian

DPRD Provinsi NTB memberi atensi terhadap masalah kekeringan yang melanda wilayah ini. Kekeringan akan berdampak pada kegiatan pertanian dan produktivitas pertanian itu sendiri. Sehingga pemerintah perlu memberi jalan keluar jangka pendek.

Anggota DPRD NTB Dr. TGH. Hazmi Hamzar mengatakan, sebenarnya NTB tidak benar-benar dalam kondisi kering, karena pada dasarnya air tanah bisa diangkat ke permukaan melalui proses pengeboran. Karena itu program sumur bor perlu diperkuat untuk memenuhi air irigasi serta air konsumsi.

“Daerah Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok tak perlu ada kekeringan, ini daerah subur. Wilayah utara dan selatan itu tinggal dibor airnya ada. Tinggal mau atau tidak pemda menganggarkan itu,” kata TGH. Hazmi Hamzar kepada *Ekbis NTB* akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, program sumur bor tak perlu dengan anggaran yang besar. Satu sumur bor kecil untuk areal 1-4 hektar dinilai sudah bisa berjalan. Tak hanya untuk air irigasi saja, namun untuk air konsumsi bisa melalui sumur bor ini.

“Selama ini ketika ada kekeringan pakai mobil tangki. Keliling diantarkan, miris hati saya. Coba dibor, banyak-banyak kita bikin. Pasti banyak air yang muncul dari sawah-sawah itu,” ujarnya.

Ia mengatakan, Provinsi NTB dengan status lumbung pangan nasional harus terus digalakkan sektor pertanian dengan pendekatan teknologi. Pembuatan sumur bor dan pompanisasi bisa menjadi solusi di tengah musim kemarau seperti sekarang ini.

Politisi PPP ini pun menyambut baik program pompanisasi yang sedang digalakkan oleh Kementerian Pertanian. Di mana sebanyak 5.100 unit pompa air akan diberikan kepada petani di Provinsi NTB. Ribuan unit pompa air tersebut diberikan kepada kelompok tani yang selama ini menggarap pertanian di lahan kering dan tadah hujan.**(ris)**



TGH. Hazmi Hamzar

Ekbis NTB/dok)

Title	Program Sumur Bor untuk Pertanian	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Suara Ntb	
Page	5 Part 2	
Author	Bul	

Program Sumur Bor untuk Pertanian

Dari Hal. 1

Hingga saat ini, BWS NTB terus berkoordinasi dengan pemda untuk memastikan pengelolaan air dilakukan dengan sangat bijak. Agar pola tanam juga disesuaikan, seh-

ingga ketersediaan air dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

“Harapan kita, musim tanam III nanti juga nanti ketersediaan air kita masih bagus,” demikian Tampang. **(bul)**

Title	Selain Pompanisasi Pemprov NTB Hadapi Kemarau dengan Sumur Dalam	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Suara Ntb	
Page	5	
Author	Era	

Selain Pompanisasi, Pemprov NTB Hadapi Kemarau dengan Sumur Dalam

PERKIRAAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kemarau tahun 2024 akan lebih panjang dibandingkan dengan tahun 2023. Sehingga, hal ini akan berdampak pada hasil panen petani.

Sebagai lumbung pangan nasional, selain dengan melakukan pompanisasi dan irigasi perpompaan, Pemerintah Provinsi NTB juga akan membuat program penggalian sumur dalam atau sumur bor bagi petani supaya Indeks Pertanian (IP) bisa meningkat.

“Terkait dengan perkiraan BMKG, kami juga sedang menyiapkan sumur dalam. Jadi sumur dalam termasuk sumur pompa, jadi apabila sumur dangkal ini misalnya hanya bisa dua kali panen, ternyata lahan kita masih bisa penanaman, kita akan bantu dengan menggali sumur dalam,” ungkap Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disdistambun) Provinsi NTB, Muhammad Taufieq Hidayat pada Kamis, 30 Mei 2024.

Program penggalian sumur dalam atau sumur bor sebagai antisipasi apabila akan terjadi kekeringan, seperti perkiraan BMKG, penggalian sumur pompa dalam ini akan dilaksanakan di lahan-lahan yang kekurangan air setelah panen. Namun masih berpotensi untuk dilakukan penanaman di lahan tersebut, sehingga IP akan turut meningkat, tidak hanya IP 100 tapi bisa sampai IP 300 per tahun. “Sekarang mau dipersiapkan programnya kalau benar-benar terjadi kekeringan,” lanjutnya.

Selain itu, Kementerian Pertanian (Kementan) juga telah mengeluarkan SK pada 24 Mei 2024 kemarin, meminta kepada Pemprov NTB untuk melakukan percepatan Pompanisasi dan Optimalisasi Pangan sebagai antisipasi darurat pangan.

Menyikapi perintah Kementan tersebut, Pemprov NTB telah melakukan distribusi pompa kepada petani yang

dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama sebanyak 173 pompa, dan sekarang tahap kedua yang masih dalam proses akan di distribusikan 3.000 pompa.

“Tahap kedua *on progress* sebanyak 3.000 pompa kepada 30.000 hektar lahan,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, Taufieq juga mengimbau kepada seluruh petani untuk

kembali menanam padi setelah panen, artinya, petani jangan sampai menanam komoditas pertanian lain di lahan penanaman padi. (era)



Muhammad Taufieq Hidayat

Title	Selamatkan Ratusan Hektar Lahan Pertanian Lewat Pompanisasi	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Suara NTB	
Page	5 Part 1	
Author	Her	

Selamatkan Ratusan Hektar Lahan Pertanian Lewat Pompanisasi

SAAT kondisi iklim yang tak menentu di NTB, khususnya di Lombok Barat (Lobar) akibat dampak cuaca ekstrem, dikhawatirkan terjadi gagal panen. Dalam hal ini Dinas Pertanian (Distan) melakukan langkah antisipasi dampak cuaca ekstrem ini. Salah satu yang dilakukan melalui program pompanisasi. Program yang dibantu pemerintah pusat ini telah mampu menangani ratusan hektar lahan padi warga yang terdampak cuaca ekstrem.

Kepala Distan Lobar Damayanti Widyaningrum mengatakan, sejauh ini pihaknya mengantisipasi lahan pertanian terdampak kekeringan akibat cuaca ekstrem melalui berbagai upaya. Pihaknya telah meminta penyuluh lapangan untuk turun mengecek wilayah yang rawan kekeringan. Hasil turun tersebut langsung dilaporkan penyuluh ke dinas untuk ditindaklanjuti.

"Kami tindaklanjuti dengan turun *action* memberikan pompanisasi, beberapa daerah



(Ekbis NTB/ist)

TURUN - Kepala Distan Lobar Damayanti Widyaningrum bersama jajaran turun langsung melakukan pengecekan lahan pertanian yang terdampak kekeringan.

ah sudah kita tangani," katanya, akhir pekan kemarin.

Disebutkan, beberapa wilayah yang dilaporkan mengalami kekeringan, langsung dibantu pompanisasi. Di antaranya, 61 hektar lahan di Gerung yang dilaporkan petugas sudah diairi melalui pompa, sehingga tidak jadi mengalam

ami kekeringan. Di Sekotong, ada 8 hektar sudah diatasi.

Kemudian di Lembar ada 139 hektar terancam kekeringan, dengan bantuan pompanisasi bisa diatasi. Selanjutnya ada lagi laporan 197 hektar juga terancam kekeringan sedang di Kuripan. Bahkan pihaknya bersama jajarannya



(Ekbis NTB/ist)

CEK POMPA - Kepala Distan Lobar Damayanti Widyaningrum mengecek bantuan pompa yang diberikan pemerintah pada petani dalam mengatasi lahan padi yang terdampak cuaca ekstrem.

turun langsung melaksanakan pompanisasi ke sawah warga terdampak. "Kami turun langsung, Alhamdulillah sudah bisa terairi melalui pompanisasi. Jadi kami sudah antisipasi sejauh itu," ujarnya.

Kalau dihitung total luasan areal lahan pertanian yang telah mampu ditangani dan di-

atasi mencapai 405 hektar. Jika dihitung hasil produksi per hektar rata-rata 5,6 ton, maka dari luasan 405 hektar tersebut mampu diselamatkan 2.268 ton hasil produksi. "Itu sudah yang bisa diselamatkan, kita berupaya Sigap sesuai jargon Pemda (Pak Pj Bupati)," ujarnya.

■ Bersambung ke hal 2

Title	Selamatkan Ratusan Hektar Lahan Pertanian Lewat Pompanisasi	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Suara Ntb	
Page	5 Part 2	
Author	Her	

Selamatkan Ratusan Hektar Lahan Pertanian Lewat Pompanisasi

Dari Hal. 1

Ia menjelaskan, pompanisasi ini merupakan langkah jangka panjang, sehingga pihaknya sudah menginventarisir petani dan daerah yang akan diberikan bantuan pompanisasi. Yakni wilayah yang punya sumber air, baik sungai, embung, air sumur tanah dangkal dan air permukaan. “Ini baru datang 41 pompa dari pusat, kami usulkan 576 pompa. Ndak tahu nanti yang disetujui berapa? Jadi kami inginkan semua daerah terutama yang lahan kering mendapatkan pompanisasi,” jelasnya.

Pompa ini butuh dilakukan

tes bersama pihak penyedia, kalau lancar berfungsi, maka barulah diserahkan. Namun sambil menunggu itu, pihaknya menggunakan alat yang ada dulu. Ketika bantuan alat pompanya datang, maka langsung diserahkan ke petani. “Ini untuk antisipasi kekeringan,” katanya.

Langkah antisipasi lain yang dilakukan, pihaknya sudah mengimbau dan mengajak para petani ikut asuransi usaha tani untin jaga-jaga kalau mengalami gagal panen, nanti bisa diganti oleh pemerintah untuk tanam lagi. **(her)**

Title	50 Ribu Ton Jagung Gorontalo Diekspor ke Filipina	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juni 2024	
Media	Gorontalo Post	
Page	3	
Author	Dan	

50 Ribu Ton Jagung Gorontalo Diekspor ke Filipina



Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Muljady D Mario mendampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat melepas jagung Gorontalo yang akan dikirim ke Filipina

Target hingga Juli,
Pengiriman Antar Pulau
Capai 264 Ribu Ton

GORONTALO-GP – Ekspor jagung Gorontalo ke Filipina masih terus berlanjut. Baru baru ini, Gorontalo melakukan ekspor perdana ke Filipina yang disaksikan langsung Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Muljady D Mario mengatakan, total sampai dengan akhir Juli nanti, jagung yang akan diekspor Gorontalo ke Filipina sebanyak 50 ribu ton. “Ekspor jagung ini kita lakukan bertahap,” katanya Kamis (30/5).

Ia juga mengungkapkan, selain ekspor, Gorontalo. selama Januari hingga Mei tahun ini sudah mengirim jagung antar pulau (pasar domestik) sebanyak 264 ribu ton. Jauh lebih tinggi dari jumlah ekspor.

Sementara itu, terkait harga jagung di gudang penampung, menurut Muljady saat ini masih dikisaran Rp3.800 per kg. Sebagaimana diketahui, Provinsi Gorontalo yang merupakan salah satu lumbung komoditas jagung di Indonesia telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Muljady menyampaikan bahwa produksi jagung saat ini meningkat dibanding kondisi yang sama pada tahun sebelumnya. **(dan)**